

PENDIDIKAN INKLUSI PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Tarbiyah**

Oleh

Siti Robi'ah

NIM : DO1304093

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K T-2010 100 PAI	No. REG : T-2010 / PAI / 100 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Tarbiyah
Jurusan Pendidikan Agama Islam**

**SURABAYA
2010**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Robi'ah
NIM : DO1304093
Semester : XI
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pendidikan Inklusi dalam Perspektif Pendidikan Islam”** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, April 2010

Siti Robi'ah
NIM D01304093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

Nama : Siti Robi'ah

NIM : DO1304093

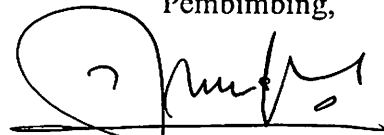
Judul : Konsep Pendidikan Inklusi Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, Mei 2010

Pembimbing,



Drs. Syaifuddin, M.Pd.I

NIP: 196911291994031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh SITI ROBI'AH ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 21 Juli 2010

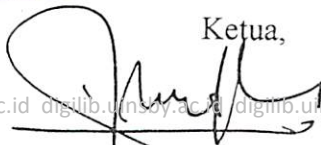
Mengesahkan
Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Nur Hamim, M.Ag
NIP. 196203121991031002

Ketua,



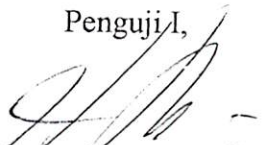
Drs. H. Syaifuddin, M.Pd.I
NIP. 196911291994031003

Sekretaris,



Sulthon Mas'ud, M.Pd.I
NIP. 197309102007011017

Penguji I,



Dr. H. M. Yurus Abu Bakar, M.Ag
NIP. 196503151998031001

Penguji II,



Dra. Ilun Mualifah, M.Pd
NIP. 196707061994032001

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan judul “Konsep Pendidikan Inklusi dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi dan Bagaimana pendidikan inklusi dilihat dari perspektif pendidikan Islam

Berkenaan dengan itu, metode yang digunakan adalah metode deskriptif-inferensial. Metode ini merupakan metode gabungan di mana peneliti tidak saja melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan keadaan suatu objek atau suatu peristiwa tanpa menarik suatu kesimpulan umum, akan tetapi juga akan melakukan analisis berdasarkan deskripsi penelitian, memberikan pemahaman, serta penjelasan secukupnya. Pendekatan yang lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif karena permasalahan penelitian yang dikaji bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. dalam hal ini peneliti mencoba memaparkan dan menuliskan tentang pendidikan Islam dan Pendidikan Inklusinya kemudian menganalisisnya. Yakni melihat Pendidikan Inklusi dengan perspektif pendidikan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, titik temu antara Pendidikan Islam dan Pendidikan Inklusi adalah: Pertama, *pendidikan sebagai kewajiban/hak*. Dalam perspektif Islam pendidikan merupakan kewajiban prasyarat, baik untuk memahami kewajiban Islam yang lain maupun untuk membangun kebudayaan/peradaban, sementara dalam perspektif inklusi pendidikan merupakan hak asasi manusia. Kedua, *prinsip pendidikan untuk semua*. Pendidikan inklusi, seperti telah dijelaskan, merupakan implikasi dari prinsip ‘pendidikan sebagai hak asasi manusia’ yang penerjemahannya dalam kebijakan global 1990 menjadi ‘pendidikan untuk semua’, sementara pendidikan Islam secara historis di masa peradaban klasik telah memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi ‘pendidikan untuk semua’ melalui pembentukan tradisi melek huruf. Ketiga, *prinsip non-segregasi*. Dengan memandang pendidikan sebagai kewajiban/hak asasi manusia, maka setiap manusia tidak boleh termarginalisasikan dan tersisih dalam memperoleh layanan pendidikan. Keempat, *perspektif holistik dalam memandang peserta didik*. Baik pendidikan Islam maupun pendidikan inklusi berupaya menumbuh-kembangkan kepribadian manusia dengan mengakui segenap daya dan potensi yang dimiliki peserta didik. Kelima, *cara memandang hambatan yang lebih berorientasi pada faktor eksternal*. Dalam artian pada dasarnya segenap daya dan potensi peserta didik wajib/berhak ditumbuh-kembangkan, maka faktor eksternal (lingkungan sekolah) harus memainkan peran penting untuk membantu peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Hendaknya Dalam melaksanakan pendidikan inklusi, lembaga pendidikan Islam perlu mempersiapkan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Agar tujuan dari pendidikan inklusi tersebut dapat tercapai secara maksimal. Bagi lingkungan masyarakat yang dilingkungannya berada lembaga pendidikan inklusi, hendaknya memberikan dukungan baik secara moral maupun material agar para peserta didik yang menjadi obyek dari pendidikan inklusi merasa dapat dukungan dan diperhatikan oleh lingkungannya. Serta hendaknya kedepan pemerintah maupun pihak swasta khususnya lembaga sosial kemasyarakatan harus membuka lembaga pendidikan yang bersifat inklusi.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLETRASI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	21



BAB II	PENDIDIKAN ISLAM	23
	A. Pengertian Pendidikan Islam	23
	B. Aspek-aspek Pengetahuan Pendidikan Islam.....	24
	C. Faktor-faktor Mempengaruhi Pelaksanaan Pendidikan Islam	25
	D. Komponen-komponen Pendidikan Islam.....	31
	E. Tujuan Pendidikan Islam	34



BAB III	PENDIDIKAN INKLUSI	39
	A. Pengertian Pendidikan Inklusi	39
	B. Ruang Lingkup Pendidikan Inklusi.....	40
	C. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	41
	D. Sejarah Pendidikan Inklusi	44
	E. Komponen-komponen Pendidikan Inklusi	67
	F. Fungsi Pendidikan Inklusi.....	69
	G. Tujuan Pendidikan Inklusi	70
	H. Prasyarat Keberhasilan Pendidikan Inklusi	72
	I. Pengalaman Penerapan Pendidikan Inklusi di Indonesia	73
	J. Alasan Pentingnya Penerapan Pendekatan Pendidikan Inklusi	78
	K. Hubungan Pendidikan Islam dan Pendidikan Inklusi	78

BAB IV	PENDIDIKAN INKLUSI PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM.....	83
	A. Dasar Pemikiran Penting Pendidikan Inklusi	83
	B. Titik Temu Pendidikan Inklusi dengan Pendidikan Islam.....	89
	C. Pandangan Pendidikan Islam terhadap Pendidikan Inklusi	91
	D. Kendala Penerapan Pendidikan Inklusi	95
	E. Agenda Pengembangan Pendidikan Inklusi Dalam Perspektif Pendidikan Islam.....	97
BAB VI	PENUTUP.....	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh siapapun tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, etnis dan lain sebagainya, sebab pendidikan merupakan salah satu sarana untuk membuat manusia meningkatkan statusnya. Seperti yang dikemukakan oleh John Dewey dengan mengatakan pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional), menuju ke arah tabiat manusia dan manusia biasa¹. Hal ini sejalan dengan ide pendidikan Islam, dimana salah satu dari tujuan pendidikan Islam seperti yang dikemukakan oleh Ahmad D Marimba adalah “terwujudnya kepribadian muslim”, yakni kepribadian yang meliputi beberapa aspek dimana aspek-aspeknya berupaya untuk merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam.

Aspek-aspek tersebut meliputi: *pertama, aspek-aspek kejasmanian*. Yakni terdiri atas tingkah laku luar yang sudah terlihat dan ketahuan dari luar, misalnya cara berbuat, berbicara dan lain sebagainya. *Kedua, aspek-aspek kejiwaan*. Adalah aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat dan ketahuan dari luar, misalnya cara-cara berpikir, sikap (berupa pendirian atau pandangan seseorang dalam menghadapi seseorang atau suatu hal) dan minat. *Ketiga, aspek-aspek*

¹ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003), h. 3.

kerohanian yang luhur. Meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih abstrak yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Terdiri atas sistem nilai-nilai yang telah meresap dalam kepribadian, menjadi bagian dan mendarah daging dalam kepribadian. Dimana hal inilah yang mengarahkan dan memberi corak seluruh kepribadian masing-masing individu manusia. Bagi orang yang beragama aspek inilah yang menuntunya kearah kebahagiaan, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Serta aspek-aspek inilah yang memberikan kualitas kepribadian manusia secara keseluruhan².

Pernyataan Ahmad D Marimba diperkuat oleh Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Touny al-Syaebani yang mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengubah tangkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses pendidikan. Dimana perubahan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai Islami. Di Indonesia sendiri, dalam Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia pada tahun 1960. Dirumuskan yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah, mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Sebab menurut pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang di dalam dirinya diberikan kelengkapan-kelengkapan

²Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam 1 Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998), h. 30-31.

psikologis dan fisik yang memiliki kecenderungan ke arah yang baik dan yang buruk³.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan tujuan pendidikan Islam tidak lain mewujudkan terbentuknya identitas Islam. Identitas Islam pada hakikatnya mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati. Dimensi-dimensi kehidupan yang mengandung nilai ideal Islami dapat dikategorikan kedalam tiga macam.

1. Dimensi yang mengandung nilai untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia. Dimensi nilai kehidupan ini mendorong kegiatan manusia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia ini untuk menjadi bekal/sarana bagi kehidupan di akhirat.
2. Dimensi yang mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan. Dimensi ini menuntut manusia untuk tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi yang dimiliki, namun kemelaratan atau kemiskinan dunia harus diberantas, sebab kemelaratan duniawi bisa menjadi ancaman yang menjerumuskan manusia kepada kekufuran.
3. Dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan (mengintegrasikan) antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi. Keseimbangan dan keserasian antara kedua kepentingan hidup ini menjadi daya tangkal terhadap

³ Muzayyin Arifin, op.cit., h.15-16.

pengaruh-pengaruh negatif dan berbagai gejolak kehidupan yang menggoda ketenangan hidup manusia baik yang bersifat spiritual, sosial, kultural, ekonomis, maupun ideologis dalam hidup pribadi manusia.

Dimensi-dimensi nilai di atas merupakan sasaran idealitas Islami yang seharusnya dijadikan dasar fundamental dari proses pendidikan Islam. Dimensi-dimensi nilai tersebut seharusnya ditanam-tumbuhkan di dalam pribadi muslim secara seutuhnya melalui proses pembudayaan yang bercorak pedagogis, dengan sistem atau struktur kependidikan yang bagaimanapun ragamnya⁴.

Adapun metode yang dipergunakan dalam pendidikan Islam seperti yang dikemukakan oleh Ustad Muhammad Said Ramadhan Al-Buwythi dalam bukunya yang berjudul *Al-Manhajut Tarbawi Faried Fil Quran*, setidaknya ada tiga macam azas/dasar yang dipakai Al-Qur'an untuk menanamkan pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. *Muhakamah Aqliyah*, mengetuk akal pikiran untuk memecahkan segala sesuatu. Di dalam tingkat ini Al-Qur'an menyadarkan setiap akal manusia untuk memikirkan asal usul dirinya, mulai dari awal kejadiannya, kemudian perkembangannya baik fisik maupun akal dan ilmunya serta mental spritualnya. Sesudah itu dibawanya ke alam cakrawala yang luas terbentang ini, dengan menggunakan kata-kata yang dapat diikuti oleh orang-orang awam dan dapat dijadikan bahan penyelidikan secara alamiah oleh para sarjana.

⁴

Ibid., h.108-109.

2. *Al-Qisah Wat Tarikh*, yakni menggunakan cerita-cerita dan pengetahuan sejarah. Dengan menggunakan berbagai cerita/peristiwa dan membuka lembaran sejarah dimasa lampau, Tuhan mengajak manusia supaya bercermin pada fakta dan data dimasa dahulu itu untuk melihat dirinya.
3. *Al-Itsarah Al-Wijdaniyah*, memberikan perangsang kepada perasaan-perasaan. Membangkitkan rangsangan perasaan-perasaan adalah jalan yang terpendek untuk menanamkan suatu karakter kepada anak-anak/pemuda-pemuda. Perasaan-perasaan tersebut terbagi atas:
 - a. *Perasaan pendorong* yaitu rasa gembira, harapan, hasrat yang besar dan lain sebagainya.
 - b. *Perasaan penahan* yaitu rasa takut (berbuat kejahatan), rasa sedih (berbuat kezaliman) dan sebagainya.
 - c. *Perasaan kekaguman* yaitu rasa hormat dan kagum, rasa cinta, bakti dan pengabdian.

Pendapat lain dikemukakan Muhammad Qurb di dalam bukunya *Minhajut Tarbiyah Islamiyah*, bahwa teknik atau metode pendidikan Islam setidaknya ada delapan yakni: *pendidikan melalui teladan, melalui nasehat, hukuman, cerita, kebiasaan, kekuatan, kekosongan dan peristiwa*⁵.

Melalui metode di atas, dapat dikemukakan bahwa pendidikan Islam mengupayakan agar materi pendidikan dan pengajaran Islam dapat diterima oleh

⁵Nur Uhbiyati, op.cit, h. 195-203.

obyek pendidikan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat *multi approach* yang dalam pelaksanaannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Pendekatan religius* yang menitik beratkan kepada pandangan bahwa manusia adalah mahluk yang berjiwa religius dengan bakat-bakat keagamaan.
2. *Pendekatan filosofis* yang memandang bahwa manusia adalah mahluk rasional atau *homo rationale* sehingga segala sesuatu yang menyangkut perkembangannya didasarkan pada sejauh mana kemampuan berpikirnya dapat dikembangkan sampai pada titik maksimal perkembangannya.
3. *Pendekatan sosio-cultural* yang bertumpu pada pandangan bahwa manusia adalah mahluk yang bermasyarakat dan berkebudayaan sehingga dipandang sebagai *homo sosius* dan *homo sapiens* dalam kehidupan bermasyarakat dan berkebudayaan. Dengan demikian pengaruh lingkungan masyarakat dan perkembangan kebudayaannya sangat besar artinya bagi proses pendidikan dan individunya.
4. *Pendekatan scientific* dimana titik beratnya terletak pada pandangan bahwa manusia memiliki kemampuan menciptakan (*kognitif*), berkemauan (*konatif*) dan merasa (*emosional* atau *afektif*). Pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan analitis-analitis dan reflektif dalam berpikir⁶.

Namun pendekatan di atas pada dasarnya belum menjawab semua permasalahan dalam penerapan pendidikan Islam. Jika kita analisis, pendekatan yang dipergunakan dalam pendidikan Islam selama ini mempunyai asumsi bahwa

⁶ Ibid., h. 194-195.

kondisi fisik maupun mental manusia sama. Dalam artian tidak ada gangguan secara mental (*kejiwaan*) dan fisik (*cacat permanen*) akibat bawaan (sejak lahir) maupun akibat kecerobohan manusia sendiri (kecelakaan). Serta masalah status sosial manusia yang disebabkan karena mereka kelompok minoritas, dari kalangan kulit berwarna, keluarga miskin dan lain sebagainya. Dimana pada akhirnya manusia yang mengalami gangguan baik mental, fisik maupun secara akibat adanya perbedaan status sosial dan lain sebagainya, akan menjadikan mereka merasa rendah diri dan lain-lain. Sikap rendah diri ini akan berpengaruh kepada kepercayaan diri dari orang yang mengalami gangguan untuk mengikuti atau bahkan mendalami pendidikan Islam secara baik.

Melihat realitas di atas, menurut hemat penulis dalam penerapan pendidikan Islam perlu mempergunakan memasukkan satu pendekatan lagi. Yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendekatan *inklusi* atau lebih tepatnya *pendidikan Islam inklusi*. Pendekatan *inklusi* beranggapan kita (manusia) diciptakan sederajat walaupun berbeda-beda. Apapun jenis kelamin, penampilan, kesehatan atau kemampuan berfungsi, kita telah diciptakan ke dalam satu masyarakat. Penting untuk diakui bahwa sebuah masyarakat normal ditandai oleh keragaman dan keserbaragaman, bukan oleh keseragaman. Namun, pada kenyataannya anak-anak dan orang dewasa yang berbeda dalam kebutuhannya dari kebutuhan kebanyakan orang telah dipisahkan

dengan alasan yang beragam untuk waktu yang terlalu lama, semua alasan tersebut tidak adil⁷.

Dasar penerapan pendidikan inklusi antara lain: Deklarasi Hak Asasi Manusia termasuk hak atas pendidikan dan partisipasi penuh dimasyarakat untuk semua orang PBB tahun 1948; Konvensi Hak Anak 1989 (PBB, diumumkan tahun 1991); Pendidikan untuk semua: Konferensi dunia tentang Pendidikan Untuk Semua di Jomtien, Thailand tahun 1990 menghasilkan beberapa hal utama yakni membawa semua anak masuk sekolah, memberikan semua anak pendidikan yang sesuai. Pada kenyataannya, ternyata tidak mencakup anak-anak yang berkebutuhan khusus (UNESCO, diumumkan tahun 1991 dan 1992); Peraturan Standar tentang Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat tahun 1993 (PBB, diumumkan tahun 1994), Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan inklusif tahun 1994 (UNESCO diumumkan pertama tahun 1994, laporan akhir tahun 1995).

Konsep-konsep baru telah diperkenalkan melalui Pernyataan Salamanca dan beberapa konsep telah diperkenalkan sebelumnya dan sejak itu. Konsep-konsep ini penting karena menggambarkan proses dan perubahan saat ini. Adapun isi dari pernyataan Salamanca tersebut menekankan tentang: Hak semua anak,

⁷ Miriam Donath Skjørten, *Memuju Inklusi dan Pengayaan*, dalam Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten (Editor), *Pendidikan-Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah pengantar*, (Bandung, atas kerjasama antara Departemen Pendidikan Nasional, Braillo Norway dan Universitas Pendidikan Indonesia [UPI], 2003) h. 5.

termasuk mereka yang berkebutuhan temporer dan permanen untuk memperoleh penyesuaian pendidikan agar dapat mengikuti sekolah; Hak semua anak untuk bersekolah di komunitas rumahnya dalam kelas-kelas inklusif; Hak semua anak untuk ikut serta dalam pendidikan yang berpusat pada anak yang memenuhi kebutuhan individual; Pengayaan dan manfaat bagi mereka semua yang terlibat akan diperoleh melalui pelaksanaan pendidikan inklusif; Hak semua anak untuk ikut serta dalam pendidikan *berkualitas* yang *bermakna* bagi setiap individu; Keyakinan bahwa pendidikan inklusif akan mengarah pada sebuah masyarakat inklusif dan akhirnya pada keefektifan biaya.

Pernyataan Salamanca juga menekankan dengan sangat jelas bahwa: Semua anak dapat dididik walaupun mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang sangat berat; Pendidikan inklusif harus memberikan pendidikan yang akan mencegah anak-anak mengembangkan harga diri yang buruk serta konsekuensi yang dapat ditimbulkannya; Pendidikan inklusif bertujuan menciptakan kerjasama bukannya persaingan. Konsekuensi dari hal-hal tersebut di atas harus membawa perubahan penting di sekolah. Hal ini akan melibatkan lebih banyak menekankan pada perkembangan kesadaran sosial termasuk interaksi dan komunikasi yang lebih baik dengan dan diantara siswa. Ini juga dapat mencakup penyesuaian dalam isi materi untuk membuat pendidikan lebih berarti bagi tiap siswa⁸. Pendidikan inklusi akan berhasil jika siswa, orangtua, guru dan sekolah tumbuh dalam suatu lingkungan dengan keterbukaan dan sensitifitas yang sangat

⁸ Ibid., h. 5-7.

konduusif bagi tiap individu dan mempunyai kesadaran pembaruan untuk setiap misinya. Maka suasana kepercayaan dan kerjasama yang meningkat dapat tercipta⁹.

B. Rumusan Masalah

Pada rumusan masalah ini akan dikemukakan dalam bentuk pertanyaan mendasar yang akan dicari jawabannya dalam penelitian nanti. Dalam penelitian ini, pertanyaan yang diajukan penulis sebagai pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana yang dimaksud dengan pendidikan inklusi?
2. Bagaimana pendidikan inklusi dilihat dari perspektif pendidikan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan pendidikan inklusi.
2. Mendapatkan gambaran bagaimana pendidikan inklusi dilihat dari perspektif pendidikan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum ada tiga manfaat dari penelitian ini yang penulis harapkan.

⁹ J David Smith, *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*, (Bandung, Nuansa, Juli 2006), h. 52.

1. Bagi Penulis.

- a. Penelitian ini nantinya, penulis harapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi penulis untuk menerapkan pendidikan Islam dengan pendekatan yang berbeda (*inklusi*).
- b. Menumbuhkan kepekaan penulis terhadap kondisi pembelajaran, dengan latar belakang peserta didik yang berbeda-beda.
- c. Memberikan pemahaman kepada penulis untuk menerapkan strategi-strategi pembelajaran baru berdasarkan kondisi peserta didik, jika ada peserta didik yang mempunyai kelainan.

2. Bagi Obyek Penelitian

- a. Bermanfaat untuk membantu memahami kondisi peserta didik yang mempunyai kelainan.
- b. Membantu mensosialisasikan pendidikan inklusi agar bisa diterima secara wajar dilingkungan pendidikan normal pada umumnya.
- c. Memberikan gambaran bagaimana pendidikan Islam melihat pendidikan inklusi, agar dipahami secara sistematis bagi pengembangan keilmuan.

3. Bagi Pengembangan Keilmuan

Sebagai tanggungjawab keilmuan, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih yang berarti bagi pengembangan keilmuan. Khususnya pendidikan inklusi dari perspektif pendidikan Islam. Supaya kedepan wacana pendidikan inklusi mampu menutupi kelemahan dalam penerapan pendidikan Islam, begitu pula sebaliknya. Pada akhirnya kedua

ilmu ini saling melengkapi dan membutuhkan untuk memberikan ilmu kepada peserta didik yang mempunyai kelainan.

E. Definisi Operasional

Agar adanya kesamaan pemahaman penafsirkan tentang judul penelitian ini. Dalam pemahaman penulis perlu untuk mengoperasionalkan judul tersebut dalam bentuk yang terperinci. Yakni menguraikan makna istilah-istilah kunci yang menjadi rangkaian kalimat dalam judul penelitian. Adapun beberapa istilah tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Konsep

Konsep menurut kamus ilmiah populer adalah ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan, rencana dasar¹⁰. Dengan demikian dapat dikatakan yang dimaksudkan dengan konsep adalah ide-ide, pengertian dasar dari sebuah pemikiran. Dimana ide tersebut dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu.

2. Pendidikan

Menurut Brubacher pendidikan sebagai proses timbal balik dari setiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan masyarakat, teman dan alam semesta. Pendidikan merupakan pola perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi manusia; moral, intelektual dan jasmani

¹⁰ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya, Penerbit Arkola, 1994), h.362.

(pancaindera), oleh dan untuk kepribadian individunya dan kegunaan masyarakatnya yang diarahkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya. Dengan demikian pendidikan adalah proses yang mana potensi-potensi ini (kemampuan, kapasitas) manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik, oleh alat (media) yang disusun sedemikian rupa dan dikelola oleh manusia untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang diharapkan¹¹.

3. Pendidikan Inklusi

Inklusi secara luas merujuk pada konsep kewarganegaraan, hak-hak sipil dan hak-hak politik serta kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Bukan hanya secara formal, tetapi sebagai sebuah kenyataan hidup mereka untuk mendapatkan kesempatan dan terlibat dalam ruang publik. Guna meningkatkan harga diri, standar hidup, mendapat pekerjaan¹² dan lain sebagainya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Mengacu pada definisi pendidikan dan inklusi di atas, jadi yang dimaksudkan dengan pendidikan inklusi adalah proses perkembangan manusia yang terorganisir bagi peningkatan potensi, moral, intelektual dan jasmani (pancaindera). Untuk membentuk kepribadian manusia sebagai bekal hidup bermasyarakat melalui lembaga pendidikan tanpa melihat latar

¹¹ Tobroni, *Pendidikan Islam Paradigma Teologis Filosofis dan Spritualitas*, (Malang: UMM Press, 2008) h. 11-12.

¹² Anthony Giddens, *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.118.

belakang manusia tersebut. Artinya pendidikan inklusi adakah pendidikan yang terbuka bagi semua tanpa ada perbedaan sedikitpun. Baik dari sisi kurikulum, bahan ajar, fasilitas yang diberikan dan lain sebagainya.

4. Perspektif

Perspektif dalam kamus populer ilmiah diartikan sebagai pengharapan; peninjauan; tinjauan; padang luas. Sedangkan untuk istilah yang menggunakan perspektif sebagai pandangan dalam mengkaji suatu masalah disebut perspektivisme. Secara harfiah perspektivisme didefinisikan sebagai faham yang menekankan acuan kepada segala kemungkinan yang ditimbulkan oleh suatu gejala atau fenomena-fenomena yang merupakan paradigma¹³.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi di atas, dapat dikatakan yang dimaksudkan dengan perspektif adalah cara pandang atau pendekatan yang dipergunakan untuk melihat, mengkaji dan menganalisis permasalahan yang sedang dibahas. Perspektif bisa dipergunakan dalam bidang kajian apapun termasuk pendidikan. Dalam penulisan ini, perspektif penulis gunakan untuk menganalisis inklusi dalam pendidikan Islam.

5. Pendidikan Islam

Secara *sosiologis* pendidikan Islam adalah aktivitas (lembaga) pendidikan Islam yang keberadaannya disemangati oleh nilai-nilai Islam, bertujuan mewujudkan misi Islam, menggunakan simbol-simbol Islam

¹³ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, op.cit, h.592.

sebagai nama lembaga itu, menyelenggarakan pengkajian terhadap ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pada umumnya serta nilai-nilai Islam mewarnai proses penyelenggaraan atau manajerialnya. Sedangkan secara *filosofis* pendidikan Islam adalah pendidikan yang berparadigma kesemestaan yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dan kealaman secara integratif dalam rangka humanisasi dan liberalisasi manusia agar manusia dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan sesama manusia¹⁴.

Jadi, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah bagaimana ide pendidikan inklusi jika dipandang dalam kacamata pendidikan Islam sehingga nantinya diharapkan terdapat titik temu yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan Islam ke depan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh untuk menemukan, menggali, dan melahirkan ilmu pengetahuan yang memiliki kebenaran yang bersifat ilmiah. Metode berasal dari *meta* dan *hodos* (Yunani) yang berarti jalan untuk sampai. Secara definitif, metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik dalam mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini disusun serangkaian metode yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, yakni:

¹⁴ Tobroni, op.cit, h. 49.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Menurut Nyoman Kutha Ratna, dalam proses penelitian, metode dan pendekatan dianggap sebagai dua hal yang sama. Namun, pada dasarnya metode tidak dapat disamakan dengan pendekatan. Metode adalah cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data, sedangkan pendekatan adalah cara-cara menghampiri objek¹⁵.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode *deskriptif-inferensial*. Metode ini merupakan metode gabungan di mana peneliti tidak saja melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan keadaan suatu objek atau suatu peristiwa tanpa menarik suatu kesimpulan umum, akan tetapi juga akan melakukan analisis berdasarkan deskripsi penelitian, memberikan pemahaman, serta penjelasan secukupnya¹⁶. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan sejarah intelektual dalam kajian dan sejarah pendidikan inklusi. Menurut Kuntowijoyo, yang dimaksud dengan pendekatan sejarah intelektual adalah mengemukakan hasil pemikiran perorangan.

¹⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 53-54.

¹⁶ *Ibid.*, h. 53

Pendekatan yang lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif karena permasalahan penelitian yang dikaji bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Peneliti mencoba untuk mengerti makna-makna sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dengan menggunakan teori untuk mengkaji obyek penelitian. Sedangkan Deskriptif karena penelitian ini hanya berkeinginan menggambarkan fenomena dengan berpijak pada prosedur-prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku secara holistik (*utuh*).

2. Jenis Data

Secara sederhana data adalah keterangan tentang sesuatu. Sedangkan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menurut Kartini Kartono, data adalah fakta-fakta atau kumpulan nilai-nilai numerik. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan data adalah hasil temuan peneliti yang belum diolah menjadi laporan atau dianalisis dengan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian. Mengingat data-data yang akan dirujuk merupakan data-data yang bersifat dokumentasi, maka jenis data yang akan digunakan termasuk dalam jenis data kepustakaan (*library research*). Data dilihat dari jenisnya berdasarkan sifat, data terbagi menjadi dua yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun yang dimaksudkan dengan data kualitatif dan data kuantitatif akan penulis jelaskan berikut.

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata

verbal, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Dalam pengertian lain, data kualitatif adalah data yang tidak dapat diselidiki secara langsung, seperti kapasitas intelegensi, opini, simpati, kejujuran, dan sejenisnya.¹⁷

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka dan biasanya disajikan dalam bentuk statistik. Pendapat lain mengatakan bahwa data kuantitatif yakni data yang dapat diselidiki secara langsung dan bisa dijumlahkan dengan alat-alat pengukur sederhana.

Berdasarkan pengelompokan di atas, maka data yang akan diacu sebagai sumber dalam penelitian ini adalah data kualitatif, mengingat objek material dan tujuan penelitian ini yang tidak dapat terjawab dengan data-data yang termasuk dalam kelompok kuantitatif.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data yang menjadi tulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang memberikan informasi atau data secara langsung dalam penulisan kepada peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya adalah teks-teks dan buku utama mengenai pendidikan inklusi.

¹⁷ Ibid., h. 72.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang tidak langsung memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Dengan kata lain, bahan-bahan informatif yang layak dijadikan rujukan dan berkaitan dengan tema, objek, dan tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan oleh peneliti mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode diantaranya:

- a. Kepustakaan (*library research*) yakni melakukan pengkajian terhadap beberapa buku atau referensi yang ada kaitannya dengan tema penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal pengumpulan data, data-data primer maupun sekunder yang dibutuhkan akan dilacak pada buku-buku, artikel-artikel, baik di koran, jurnal, dan majalah, serta pada data-data yang dapat diakses di situs-situs internet.

- b. Metode wawancara (*interview*) yakni metode mengumpulkan data dengan cara bertanya kepada pihak yang mengerti dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, yang akan diwawancara adalah para praktisi pendidikan yang memahami pendidikan Islam dan pendidikan inklusi. Pilihan untuk menggunakan metode wawancara dalam penelitian ini didasarkan pada fungsi metode wawancara yang dapat digunakan untuk memperoleh latar belakang sosial, sikap, keinginan, dan

interpretasinya mengenai sesuatu masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Disamping itu, metode wawancara juga dapat dijadikan landasan untuk memverifikasi dan mengecek data yang diperoleh dari sumber-sumber informasi sekunder¹⁸.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun informasi yang telah dikumpulkan secara sistematis agar dapat dimengerti dan dipahami secara gampang oleh orang lain. Dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan membuat kesimpulan.

Sesudah data-data yang diperlukan terkumpul, data-data tersebut akan dianalisis berdasarkan pada rumusan analisis penelitian yang menggunakan metode deksriptif kepustakaan yang, menurut Erna Widodo dan Mukhtar, dibagi ke dalam dua fase analisis: *pertama*, analisis kritis (*critical analysis*) terhadap data-data yang dikumpulkan dan yang dinilai memiliki relevansi dengan tema dan objek material penelitian; dan *kedua*, interpretasi kritis (*critical interpretation*) terhadap data-data yang telah dikumpulkan serta dideskripsikan agar dapat memberikan jawaban eksplisit atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.¹⁹

¹⁸ Ibid., h. 189.

¹⁹ Erna Widido & Makhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif* (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), h. 7.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan pada skripsi ini penulis mengatur secara sistematis. Penulisan ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sistematika skripsi akan penulis rinci sebagai berikut.

Bab Pertama merupakan pijakan awal dari penelitian, berisi tentang: Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini penulis akan menguraikan kajian teori yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam bab ini adalah teori Pendidikan Islam terdiri atas: pengertian pendidikan islam, ruang lingkup pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan Islam, komponen-komponen pendidikan Islam, fungsi pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan Islam.

Bab ketiga, pada bab ini penulis menguraikan tentang teori pendidikan inklusi yang terdiri atas: pengertian pendidikan inklusi, ruang lingkup pendidikan inklusi, dasar-dasar pendidikan inklusi, Sejarah pendidikan inklusi komponen-komponen pendidikan inklusi, fungsi pendidikan inklusi, tujuan pendidikan inklusi., pengalaman penerapan pendidikan inklusi, pentingnya penerapan pendidikan inklusi, serta dilengkapi dengan hubungan pendidikan inklusi dengan pendidikan Islam.

Bab Keempat adalah Analisis data. Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan atau melakukan analisis terhadap obyek penelitian. Yakni pembahasan tentang Analisis Pandangan Pendidikan Islam Terhadap Pendidikan Inklusi.

Bab Kelima yakni penutup. Pada bagian ini, terdiri atas dua sub bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat tentang beberapa hal penting yang dibuat secara ringkas dari temuan penelitian atau bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan beberapa rekomendasi yang akan diberikan oleh penulis terhadap hasil penelitian, agar mempunyai nilai guna dikemudian hari.

BAB II

PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Pendidikan Islam

Ada banyak sekali pengertian tentang pendidikan Islam, dimana masing-masing pakar mempunyai pengertian sendiri-diri tentang pendidikan Islam. Walaupun secara garis besar, pengertian yang diberikan oleh para pakar tersebut hampir sama. Dalam penulisan skripsi ini, pengertian Pendidikan Islam menurut Abd Rahman Saleh adalah usaha yang berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai pendidikan nya dapat memahami ajaran-ajaran Agama Islam serta menjadikannya *way of lave* (jalan keluar)¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut prof. Dr omar Muhammad al-Toumi al- Syaibani bahwa Pendidikan Islam adalah proses pengubahan tingkah laku individu pada kehidupan pribadi masyarakat dan alam sekitarnya. Dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.²

Adapun yang dimaksudkan dengan Pendidikan Islam menurut Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) 1994 berbunyi “Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami menghayati dan mengamalkan Agama Islam melalui kegiatan bimbingan

¹ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Pendidikan Islam*, (Solo: Ramadhani, 1993), h. 10.

² Muhamimin A. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h.126.

pengajaran dan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain adalah hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.³

Pengertian tersebut disempurnakan menurut kurikulum 2004, bahwasannya Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Aspek-Aspek Pengetahuan Pendidikan Islam

Berdasarkan pengertian di atas, maka Bunyamin S. Bloom dalam bukunya *The Taxonomy Of Educational Objektif Cognitive deman*, menyatakan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran PAI akan di peroleh 3 aspek kemampuan yaitu aspek pengetahuan (cognitive), aspek sikap (afective), dan aspek ketrampilan (psykomotorik).⁵

³ Depdikbud, *GBPP 1994 SMU*, (Jakarta, 1995), h. 1.

⁴ Depdikbud, *Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran PAI SMA dan MA*, (Jakarta: 2003), h. 4.

⁵ Muhaimin dan Abdul Ghofur, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Citra Media, 1996), h. 4.

Dalam proses pembelajaran terjadinya perubahan pada ketiga aspek tersebut (aspek kognitif, psikomotorik dan afektif) sangat diharapkan yang akhirnya akan berpengaruh pada tingkah laku murid sehingga cara berfikir, cara merasa dan cara seorang murid akan melakukan sesuatu hal akan menjadi relatif menetap dan membentuk kebiasaan bertingkah laku pada dirinya.

Dengan demikian, dapatlah penulis simpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan kegiatan mengalihkan pengalaman, pengetahuan dan kecakapannya oleh pendidik terhadap peserta didik untuk mengarahkan menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan berkepribadian yang utuh yang mengenal, memahami, menghayati, mengimani bertaqwa dan berakhlak mulai digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id serta mengamalkan ajaran-ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari dan juga akan mengarahkan manusia dalam kehidupan yang lebih baik yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.

C. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pelaksanaan Pendidikan Islam

Pendidikan Agama Islam yang diharapkan terjadinya perubahan dalam diri anak baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, akan berpengaruh pada tingkah laku anak didik, dimana pada akhirnya cara berpikir, merasa dan melakukan sesuatu itu akan menjadi relatif menetap dan membentuk kebiasaan bertingkah laku (yang baik) pada dirinya.

Agar perubahan-perubahan dalam diri anak didik sebagai hasil dari suatu proses belajar mengajar sampai pada tujuan yang diharapkan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Dimana dalam proses belajar mengajar ikut berfungsi pula sejumlah faktor yang dengan sengaja direncanakan dan dimanipulasikan guru menuju tercapainya keluaran (out put) yang dikehendaki dalam hal ini, kurikulum, guru yang mengajar, sarana dan fasilitas dan instrumental input merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan dalam pencapaian hasil/out put yang dikehendaki. Karena instrumental input inilah yang menentukan bagaimana proses belajar mengajar itu akan terjadi dalam diri si pelajar.⁶

Sejalan dengan proses belajar mengajar tersebut maka faktor-faktor yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mempengaruhi proses dan belajar itu dikelompokkan menjadi 2 faktor.⁷ Yaitu faktor intern dan faktor ektern.

1. Faktor ektern: faktor yang ada di luar individu

Dalam faktor ekstern ini meliputi lingkungan dan instrumental

a. Lingkungan

Faktor lingkungan dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu:

- 1) Lingkungan alami seperti suhu, kelembapan udara sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar

⁶ M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.107.

⁷ Sumadi Surya Brata, *Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h.7 - 13

- 2) Lingkungan sosial baik yang berwujud manusia/respentasinya ataupun yang berwujud lainnya seperti suara mesin pabrik, hiruk pikuk lalu lintas

Sedangkan menurut Rasyiah dalam bukunya masalah-masalah keguruan, lingkungan itu di bagi 3:

- 1) Lingkungan sekolah (interaksi guru murid, metode pengajaran, hubungan antar murid, media pendidikan, kurikulum dan lain-lain)
- 2) Keluarga, meliputi; cara mendidik orang tua kepada anak, keadaan sosial ekonomi keluarga, suasana dalam keluarga, pengertian orang tua terhadap anak, latar belakang kebudayaan dan pendidikan.

Dalam Hadits Rasulullah disebutkan bahwa keluarga sangat besar peranannya dalam membina masa depan putera-puterinya secara berkualitas dan berdaya guna sebagaimana Haditsnya berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ

يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ يَمَجِسَانِهِ (رواه الطبرانی والبيهقي)

Artinya:

"Rasulullah Saw bersabda : Setiap anak dilahirkan atas fitrah (kesucian agama yang sesuai dengan naluri), maka kedua orang

tuanyulah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani dan menjadi Majusi. (HR. Thabrani dan Baihaqi).⁸

- 3) Lingkungan masyarakat, meliputi: media massa, teman bergaul, cara hidup lingkungan dan kegiatan-kegiatan lain.

b. Instrumental

Faktor ini dapat berwujud faktor-faktor keras (hard ware) seperti gedung, perlengkapan belajar, alat-alat praktikum, dan sebagainya. Dapat juga berwujud faktor-faktor lunak seperti, kurikulum, pedoman belajar, guru, metode, media, dan lain-lain.

2. Faktor intern: faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri. dalam faktor ini mencakup faktor fisiologis dan psikologis.

a. Kondisi fisiologis

Kondisi ini meliputi: kondisi fisik (kesehatan) dan faktor-faktor tubuh di samping itu kondisi panca indera terutama penglihatan dan pendengaran pun sangat mempengaruhi proses belajar mengajar karena sebagian besar yang dipelajari manusia di pelajarnya dengan menggunakan penglihatan dan pendengaran.

b. Kondisi Psikologis

Kondisi psikologis yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam antara lain: Minat, Kecerdasan (intelegensi), Bakat, Motivasi

⁸ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.115.

dan Kultural.⁹ Sedangkan menurut Muhibbin Syah dalam bukunya psikologi pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar.¹⁰ Meliputi: karakteristik siswa, karakteristik guru, interaksi dan metode, fasilitas, mata pelajaran dan lingkungan .

Untuk pelaksanaan pendidikan agama Islam sendiri, setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran PAI menurut Muhaimin, adapun ketiga faktor,¹¹ tersebut meliputi :

a. Kondisi Pembelajaran PAI

Kondisi ini dapat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran PAI, kondisi ini di pengaruhi oleh tujuan dan karakteristik PAI, Kedudukan sumber belajar dan karakteristik bidang studi PAI, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id karakteristik peserta didik.

b. Metode Pembelajaran PAI

Dalam pengertian *letterlik*, kata metode berasal dari bahasa Greek yang terdiri dari *meta* yang berarti melalui, dan *hodos* yang berarti jalan. Jadi, metode berarti jalan yang dilalui. Dalam pandangan filosof pendidikan, metode merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan pendidikan. Metode pembelajaran PAI merupakan cara-cara tertentu yang paling cocok untuk dapat gunakan dalam mencapai hasil-hasil pembelajaran PAI yang berada dalam kondisi pembelajaran tertentu.

⁹ A. S. Sudirman R. Raharjo dan Amung H, *Media Pendidikan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), h. 14

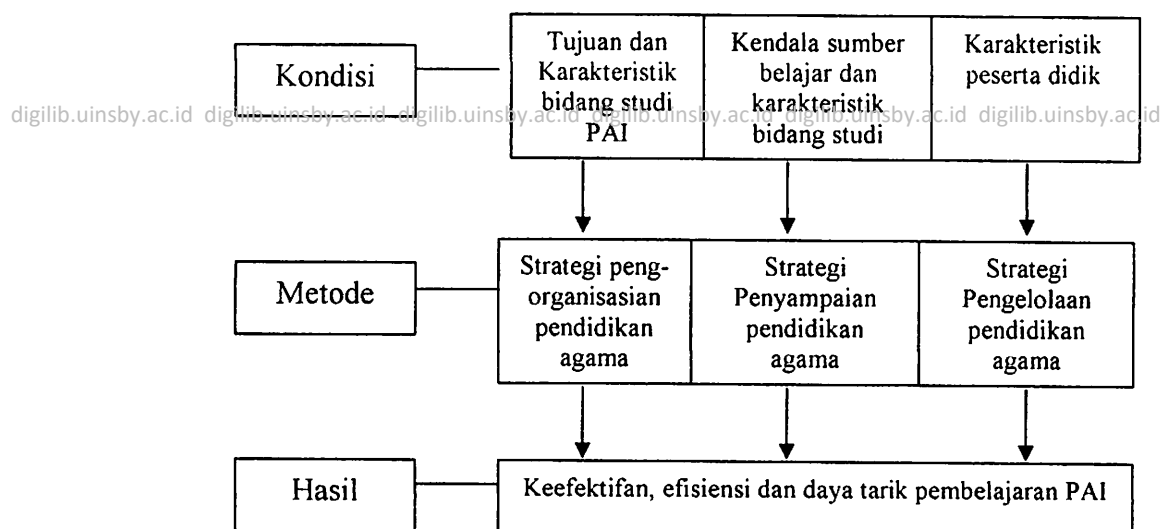
¹⁰ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, h.247-250

¹¹ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 150-156.

Yang termasuk dalam metode pembelajaran PAI adalah strategi pengorganisasian, strategi penyampaian dan strategi pengelolaan pembelajaran.

c. Hasil pembelajaran PAI

Hasil pembelajaran PAI mencakup akibat yang dapat dijadikan indikator tentang nilai-nilai dari penggunaan metode pembelajaran PAI di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda-beda. Hal ini dapat berupa keefektifan, efisiensi, dan daya tarik. Pembelajaran PAI tersebut digambarkan oleh Muhaimin sebagai berikut :



D. Komponen-Komponen Pendidikan Islam

Sebagai suatu sistem tentu saja kegiatan belajar mengajar khususnya PAI mengandung sejumlah komponen yang saling interaksi dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran PAI, komponen-komponen dalam proses belajar mengajar PAI itu meliputi¹² :

1. Tujuan

Tujuan merupakan komponen yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan pengajaran akan mewarnai cara anak didik bersikap dan berbuat dalam lingkungan sosialnya.

2. Bahan pelajaran

Bahan pelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar atas dasar tujuan intruksional dan sebagai sumber belajar bagi anak didik, hal ini dapat berupa benda dan isi pendidikan yang berupa pengetahuan, perilaku, nilai, sikap dan metode pemerolehannya.¹³

3. Kegiatan belajar mengajar

Kegiatan belajar mengajar ini akan menentukan sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam hal ini guru hanya sebagai fasilitator dan motivator, sehingga guru harus dapat memahami dan memperhatikan aspek individual anak didik baik dalam aspek biologis, intelektual dan psikologis

¹² Syaiful Bahri Djamarah, *op.cit*, h.48.

¹³ Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h.33-34

4. Metode, merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses belajar mengajar, kombinasi dalam penggunaan dari berbagai metode mengajar merupakan keharusan dalam praktek mengajar.

Salah satu metode dalam PAI adalah metode teladan, dalam al-Qur'an kata teladan diproyeksikan dengan kata uswah yang kemudian diberi sifat dibelakangnya seperti sifat husna yang berarti baik, sehingga terdapat ungkapan uswatun hasanah yang artinya teladan yang baik. Contohnya dalam surat al-Ahzhab, 34 : 21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzhab: 21).¹⁴

Dari uraian di atas, ada beberapa konsep konsep yang dapat diambil sebagai dasar penggunaan metode :¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), h. 1098.

¹⁵ Abuddin Nata, *Filsafat*, h. 95.

- a. Metode pendidikan Islam berpusat pada keteladanan.
- b. Teladan untuk guru-guru (dan lain-lain) ialah Rasulullah.

5. Alat

Alat merupakan segala sesuatu cara yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran, memperjelas bahan pengajaran yang diberikan guru atau yang dipelajari siswa.

6. Sumber pelajaran

Sumber pelajaran merupakan bahan atau materi untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar.¹⁶

7. Evaluasi

Merupakan proses menentukan nilai suatu obyek tertentu berdasarkan kriteria tertentu, dalam pembelajaran berfungsi untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengetahuan instruksional dan sebagai bahan dalam memperbaiki proses belajar mengajar.¹⁷

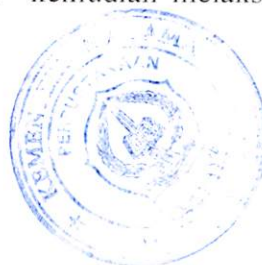
Ketujuh komponen tersebut adalah saling berhubungan satu sama lain, tidak ada satupun komponen yang dapat dilepaskan satu sama lainnya karena dapat mengakibatkan tersendatnya proses belajar mengajar pendidikan agama Islam.

Dalam proses belajar mengajar PAI selalu ditekankan pada interaksi antara guru dan murid yang harus diikuti oleh tujuan pendidikan-pendidikan agama, usaha guru dalam membantu murid untuk mencapai tujuan adalah guru harus

¹⁶ Sudirman IN. dkk, *Ilmu Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 199), h.203.

¹⁷ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 1995), h.134.

memilih bahan yang sesuai kemudian memilih dalam menetapkan metode dan sarana yang paling tepat dan sesuai dalam penyampaian bahan dengan mempertimbangkan faktor-faktor situasional kemudian melaksanakan evaluasi sehingga dapat memperlancar PAI.¹⁸



E. Tujuan Pendidikan Islam

Taraf pencapaian tujuan pembelajaran pada hakekatnya merupakan petunjuk praktis tentang sejauh manakah proses pembelajaran itu harus dibawa untuk mencapai tujuan akhir. Dengan tujuan yang jelas akan memberikan petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan bahan pelajaran, Penetapan metode mengajar dan alat Bantu pengajaran serta memberikan petunjuk terhadap penilaian.¹⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan pendidikan dalam Islam dibagi kepada beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Yang dimaksud dengan tujuan umum adalah perubahan-perubahan yang dikehendaki yang diusahakan oleh pendidikan untuk mencapainya. Diantara pendapat ilmuwan tentang tujuan umum pendidikan dapat disebutkan di bawah ini.

- a. Al-Abrasyi dalam kajiannya tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan lima tujuan umum bagi pendidikan Islam, yaitu:

¹⁸ Muhammin dan Abdul Ghofur, *op.cit*, h.75.

¹⁹ Muhammad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), h.56.

- 1) Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia.
 - 2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat
 - 3) Persiapan untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi manfaat
 - 4) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar
 - 5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional
- b. Sedangkan al-Jammali menyebutkan tujuan-tujuan pendidikan yang diambilnya dari al-Qur'an sebagai berikut:
- 1) Memperkenalkan kepada manusia akan tempatnya di antara makhluk-makhluk dan akan tanggung jawab perseorangannya dalam hidup ini.
 - 2) Memperkenalkan kepada manusia akan hubungan-hubungan sosialnya dan tanggung jawabnya dalam jangka suatu sistem sosial.
 - 3) Memperkenalkan kepada manusia akan makhluk (alam semesta)
 - 4) Memperkenalkan kepada manusia akan pencipta alam semesta ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan Khusus Pendidikan Islam

Yang dimaksud dengan tujuan khusus adalah perubahan-perubahan yang diinginkan yang merupakan bagian yang termasuk di bawah tiap tujuan umum pendidikan, di antara tujuan khusus pendidikan Islam adalah:

- a. Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam, dasar-dasarnya, asal-usul ibadat dan cara-cara melaksanakannya dengan betul.
- b. Menumbuhkan kesadaran yang betul pada diri pelajar tentang agama.

- c. Menanamkan keimanan kepada Allah Pencipta alam, malaikat, Rasul, Kitab-kitab dan hari akhirat.
 - d. Menumbuhkan minat generasi muda untuk menambah pengetahuan dalam adab dan pengetahuan keagamaan.
3. Tujuan Terakhir Pendidikan Islam²⁰

Tujuan akhir pendidikan Islam dapat dipahami dalam firman Allah dalam surat Adz-dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya :

*“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada-Ku.”*²¹

Sedangkan menurut Zakiah Daradjat, bahwa tujuan akhir pendidikan Islam dapat dipahami dalam firman Allah dalam Surat al-Imran ayat 102 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”* (QS. Ali Imran : 102)²²

²⁰ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, h.. 57.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 523

Mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai muslim yang merupakan ujung dari taqwa sebagai akhir dari proses hidup jelas berisi kegiatan pendidikan. Insan kamil yang mati dan akan menghadap Tuhan-Nya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam.

Pendidikan agama mempunyai tujuan-tujuan yang berintikan tiga aspek, yaitu aspek iman, ilmu dan amal yang pada dasarnya berisi:²³

1. Menumbuhsururkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam pelbagai kehidupan anak yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT taat kepada perintah Allah dan rasul-Nya.
2. Ketaatan kepada Allah SWT dan rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki anak.
3. Menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam semua lapangan hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara mendalam dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup, baik dalam hubungan dirinya dengan Allah SWT dan dalam hubungannya dengan sesama manusia, serta dalam hubungan dirinya dengan alam sekitarnya.

Agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan dirinya yang dapat menjamin keselarasan,

²² Ibid., h. 87

²³ Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.87.

keseimbangan, dan keserasian hidup manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam mencapai kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniyah.

Lazimnya tujuan pendidikan itu ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan itu diperinci ketentuan-ketentuan bagi tujuan lembaga pendidikan tertentu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang kualitas manusia yang dicita-citakan sehingga terbentuk sebagai hasil pengalaman pendidikan pada lembaga pengajaran di lembaga tersebut. misalnya di Indonesia telah ditetapkan dasar, tujuan, dan sistem pendidikan yaitu sistem pendidikan nasional.

Agar tujuan itu mendapat bentuk yang nyata (operasional) maka diperlukan

suatu cara kerja yang efisien yang berupa sistem penilaian/evaluasi, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sifat-sifat pencapaian tujuan baik dari pihak murid/guru, disamping itu diperlukan juga rumusan tujuan secara lebih kongkrit, khusus dan lebih jelas yang dipusatkan pada pembahasan tingkah laku anak didik dan realistik bagi kebutuhan perkembangan murid.²⁴

²⁴ Muhaimin, *op.cit*, h.78-81

BAB III

PENDIDIKAN INKLUSI

A. Pengertian Pendidikan Inklusi

Pengertian inklusi secara luas merujuk pada konsep kewarganegaraan, hak-hak sipil dan hak-hak politik serta kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Bukan hanya secara formal, tetapi sebagai sebuah kenyataan hidup mereka untuk mendapatkan kesempatan dan terlibat dalam ruang publik. Guna meningkatkan harga diri, standar hidup, mendapat pekerjaan dan lain sebagainya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.¹

Secara konseptual pengertian pendidikan inklusi adalah proses pemindahan ilmu pengetahuan kepada kelompok tertentu yang membutuhkan penanganan khusus. Adapun peserta didik yang mengalami kesulitan belajar khusus dapat berupa peserta didik yang mempunyai hambatan dalam bicara dan berbahasa, terbelakang mental, gangguan emosional yang serius, hambatan pendengaran, tunaganda, penglihatan, fisik, luka otak trauma, autis maupun hambatan kesehatan lainnya.²

Selain itu pengertian pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menampung semua murid di kelas yang sama dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anak di kelas yang sama. Dalam pengetahuan bahwa setiap anak diberi

¹ Anthony Giddens, op.cit., h.118.

² J David Smith, *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*, (Bandung, Nuansa, 2006), h.50.

kesempatan untuk saling membantu, saling menolong, saling menerima karakteristik yang berbeda-beda kemampuan dan kesempurnaan baik sifat, fisik maupun psikisnya.³

B. Ruang Lingkup Pendidikan Inklusi

Secara umum yang menjadi ruang lingkup dari penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa atau peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar atau lebih khususnya adalah kesulitan belajar khusus. Menurut pengertian yang digunakan oleh pemerintahan federal di Amerika Serikat yang dimaksudkan dengan “kesulitan belajar khusus (*specific learning disability*)” adalah suatu gangguan pada satu atau lebih proses psikologis dasar yang meliputi pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan, yang dapat diwujudkan dengan kemampuan yang tidak sempurna dalam mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja atau melakukan perhitungan matematis. Istilah ini meliputi pula kondisi-kondisi tertentu seperti gangguan persepsi (*perceptual handicaps*), luka otak (*brain injury*), disfungsi minimal otak/DMO (*minimal brain dysfunction/MBD*), dislektia (*dyslexia*) dan aphasia perkembangan (*developmental aphasia*).⁴

Adapun ruang lingkup masalah yang sering kali muncul dalam konteks pendidikan inklusi adalah : *pertama*, masalah-masalah bahasa (*language*

³ M.K. Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Inklusi Dan Efektifitasnya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Negeri Inklusi Klampis-Ngasem I Surabaya*, dalam Antologi Kajian Islam seri 13, (Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2008),, h.171

⁴ J David Smith, *op.cit*, h. 75.

problems). Kedua, masalah-masalah perhatian dan aktivitas (*attention and activity problems*). Ketiga, masalah-masalah daya ingat (*memory problems*). Keempat, masalah-masalah kognisi (*cognitive problems*). Kelima, masalah-masalah sosial dan emosi (*sosial and emotional problems*).⁵

C. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Penangan seperti ini tentu saja masih tidak bisa lepas dari klasifikasi atau “pelabelan” yang mengarah pada dua hal yang paradoks, yaitu antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus sendiri, yang selanjutnya mempengaruhi proses dan akibat pada masing-masing individu (pada dua jenis anak tersebut). Seperti pelabelan yang dilakukan oleh penegak hukum (polisi, jaksa atau hakim) pada seseorang yang telah melakukan tindak kriminal dengan sebutan penjahat. Pelabelan bisa juga terjadi dalam aspek kehidupan yang lain baik yang bersifat positif maupun negatif, seperti: genius, berbakat, berprestasi, bisu atau buta, tuli dan lain sebagainya. Pelabelan pada anak yang mendapat layanan khusus akan memberi pengaruh pada penodaan. Minoritas anak yang diberi label idiot misalnya, menimbulkan permasalahan diskriminasi dan pemisahan pada anak didik.

Dasar lain yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah dari sisi gerakan normalisasi yang didasarkan pada filosofi bahwa setiap individu (anak berkebutuhan khusus) sedapat mungkin diberi pendidikan dan

⁵ Ibid, h.80-83.

lingkungan hidup yang normal. Normalisasi ini terkait dengan sistem integrasi dan mainstreaming (dari kata mainstream yang berarti masyarakat umum) yaitu melayani anak berkebutuhan khusus dalam sekolah umum.

Seperti gerakan reformasi para positivis dalam pengobatan terhadap orang gila, justru dinilai oleh Michael Foucault tidak lebih sebagai pemenjaraan dari pada perawatan medis. Dengan model pelayanan rumah sakit jiwa, orang gila ditakuti dan disalahkan karena kegilaan mereka. Orang gila dihukum sepanjang hidupnya bukan hanya oleh orang lain tetapi juga oleh diri mereka sendiri. Di sinilah letak pentingnya normalisasi dan humanisasi terhadap orang yang berkelainan agar mereka tidak tertindas dan terpenjara, maka pelayanan bagi mereka tidak harus dimarginalkan dari kehidupan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan normalisasi sendiri jika dilihat dari perspektif ekologis dengan meminjam perspektif fenomenologis interaksionis simbolik yang memandang bahwa kesadaran manusia dan makna subyektif merupakan fokus untuk memahami tindakan sosial. Maka orang, situasi dan kejadian tidak akan memiliki maknanya sendiri, tanpa diberikan pemaknaan kepada hal-hal tersebut. Dengan demikian menurut teori ini, kesulitan diciptakan oleh konstruk sosial. Seseorang dikatakan berkesulitan sepanjang orang lain menerimanya sebagai berkesulitan. Demikian juga, orang dikatakan berkebutuhan khusus sepanjang orang lain menerimanya sebagai berkebutuhan khusus.

Sementara dari sudut pandang hak asasi akan lebih menarik lagi karena adanya tarik ulur antara hak anak normal di satu sisi, dan anak berkebutuhan

husus di sisi yang lainnya. Sebagaimana penjelasan di atas, pelayanan inklusi bertujuan untuk menghilangkan segregasi dengan mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus dan memenuhi haknya ditengah anak-anak normal. Erat kaitannya dengan beberapa konsep di atas, seorang tokoh pendidikan Paulo Friere, menggagas adanya *concientizacao* (kesadaran untuk melakukan). Yaitu kesadaran untuk melakukan pembelaan kemanusiaan untuk memberantas buta huruf, yang dimaknai sebagai usaha pembebasan manusia dari belenggu kebodohan.

Lebih Paulo Friere mengklasifikasikan kesadaran dalam tiga hal yakni: *pertama*, kesadaran magis (*magical conciusness*) yakni kesadaran (di luar factor manusia) yang tidak mampu melihat kaitan antara satu factor dengan yang lainnya. *Kedua*, kesadaran naif (*naival conciusness*) yaitu manusia menjadi akar penyebab masalah manusia. *Ketiga*, kesadaran kritis (*critical conciusness*), yaitu sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Dengan kata lain yang ingin dikatakan oleh Friere adalah manusia, struktur, dan sistem sosial, politik, ekonomi serta budaya memegang peranan penting dalam proses konstruksi manusia. Sehingga penting adanya sebuah proses penyadaran dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada pengenalan realitas dari manusia dan diri peserta didik.

Dari beberapa dasar pemikiran di atas, serta teori pembebasan Friere ini dapat digunakan untuk mengkaji proses pembelajaran inklusi. Agar komponen-komponen yang ada seperti guru, manajemen, kurikulum dan sebagainya, jika

dilihat dari pandangan pembebasan Friere harusnya tidak lagi membelenggu peserta didik. Akan tetapi justru sebaliknya yakni membebaskan dan mencerahkan peserta didik, baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus. Dengan kurikulum dan layanan pengelolaan inklusi, segregasi antara peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusus dapat terhapus. Bahkan akan terjadi relasi yang komunikatif, interaktif dan saling menguntungkan antara kedua kelompok peserta didik ini.⁶

D. Sejarah Pendidikan Inklusi

Selama beberapa dekade yang lalu, telah mengalami banyak perubahan dalam pendidikan bagi anak penyandang cacat. Perubahan-perubahan ini termasuk perubahan dalam kesadaran dan sikap, keadaan, metodologi, penggunaan konsep-konsep terkait dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini tidak hanya relevan bagi kepentingan dan pengayaan anak penyandang cacat, tetapi juga bagi pengayaan semua yang terlibat; anak-anak (dengan atau tanpa kecacatan), keluarganya, guru-guru dan kepala sekolahnya, komunitas sekolahnya dan mungkin masyarakat secara keseluruhan.

Konsekuensi yang paling penting dari perubahan-perubahan ini adalah pengakuan dan penghargaan akan adanya keragaman. Hal ini juga menghasilkan upaya-upaya untuk “membawa kembali” ke dalam masyarakat mereka yang sebelumnya telah dipisahkan atau disegregasikan oleh mayoritas terbesar

⁶ M.K. Syarif Hidayatullah, *op.cit.*, h. 172-173.

masyarakat karena mereka berbeda. Diantara yang telah dipisahkan tersebut kita temukan anak-anak yang mempunyai hambatan belajar dan perkembangan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan diantaranya oleh kecacatan, tetapi bukan hanya oleh kecacatan saja.

Selama berabad-abad, di semua negara, individu dan kelompok yang berbeda dari kebanyakan individu atau kelompok lainnya selalu ditolak oleh masyarakatnya. Di satu sisi, hal ini terjadi karena rasa takut terhadap sesuatu yang tidak diketahui, dan di sisi lain karena perjuangan untuk bertahan hidup (bertahan hidup bagi mereka yang paling kuat). Anggota kelompok yang terlalu lemah untuk berkontribusi terhadap kelangsungan hidup kelompoknya dikeluarkan dari keanggotaannya. Tetapi hal ini juga terjadi pada mereka yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id melakukan hal-hal dengan cara yang tidak biasa atau mereka yang ingin memperkenalkan ide-ide baru. Orang semacam ini sering disebut pemberontak atau penghianat dan maka dari itu mereka mungkin dibunuh, dikurung dalam penjara, dalam rumah sakit jiwa atau hanya dikucilkan di dalam komunitasnya.⁷

Kurangnya pengetahuan mengenai hakikat dan penyebab kecacatan dapat menimbulkan rasa takut sehingga mengembangkan segala macam kepercayaan dan takhayul. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara kebudayaan di Utara, Selatan, Timur atau Barat. Misalnya, dulu, bahkan sekarang pun kadang-kadang

⁷ Johnsen, B. H. Dan Skjorten, M. D, *Education – Special Needs Education: An Introduction*. (Oslo: Unipub forlag, 2001), h.44

masih ada orang percaya bahwa ibu yang melahirkan anak cacat merupakan hukuman baginya atas dosa-dosa nenek moyangnya.

Secara praktis, psikologis, sosial maupun budaya, mempunyai seorang anak yang cacat itu memang sulit. Dengan maksud baik, orang tua sering disarankan untuk melupakan anaknya yang cacat itu dan agar melahirkan anak yang lain. Di masa lampau, anak-anak yang cacat juga sering disembunyikan dalam ruangan terkunci, dibuang di ladang atau hutan untuk bertahan hidup atau mati. Kadang-kadang mereka diberikan kepada orang lain atau badan amal. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya para ibu dan ayah jarang melupakan atau berhenti mencintai anaknya itu.⁸

Dalam konteks Eropa, sekolah dasar di Norwegia mempunyai sejarah yang sangat panjang sejak pengesahannya secara resmi oleh Raja Christian VI pada tahun 1739. Fondasi sekolah ini, yaitu “untuk semua dan setiap orang”, merupakan upaya utama dalam bidang pendidikan pada waktu itu, yang dilaksanakan oleh monarki otokratik, dan sangat dipengaruhi oleh ideologi Kristen pietism dan cameralism. Sejak awal tahun 1739, dibuat keputusan bahwa sekolah harus untuk “semua dan setiap orang”. Sejak waktu itu, sekolah bebas biaya. Namun, dalam kaitannya dengan kepedulian manusia dewasa ini, ternyata sekolah tersebut tidak benar-benar bagi semua orang, termasuk anak-anak penyandang cacat dan berkebutuhan khusus yang memerlukan dukungan pendidikan.

⁸ Ibid., h.45

Erik Pontoppidan (1698-1764) adalah salah seorang penggagas utama sekolah baru ini. Atas perintah Raja, dia membuat buku pelajaran pertama, yang disebut Penjelasan Pontoppidan, yang menjadi buku teks yang paling banyak digunakan sepanjang sejarah sekolah dasar Norwegia. Di samping itu, dia juga menulis tentang pendidikan dalam banyak teks lainnya. Sebagai Uskup Bergen, dia telah berusaha keras untuk menerapkan undang-undang baru tentang sekolah untuk semua orang, di antaranya dengan mendirikan lembaga pendidikan guru yang pertama di seluruh negeri yang hanya bertahan dalam waktu yang singkat.

Dalam tulisannya tentang pendidikan, Pontoppidan menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa anak-anak belajar dengan cara yang berbeda-beda dan dengan kecepatan yang berbeda-beda. *Pontoppidan* adalah buku tebal dengan banyak halaman, dan para siswa diharapkan mampu menghafalnya di luar kepala. Akan tetapi, dia menandai beberapa bagian buku teks itu dengan menggarisi bagian tepinya, untuk menunjukkan bahwa bagian tersebut tidak penting dipelajari oleh siswa yang mempunyai kesulitan karena alasan internal atau eksternal. Ini merupakan contoh pertama yang diketahui tentang pembedaan isi dalam sejarah sekolah dasar biasa. Dalam teksnya yang lain terdapat pula sebuah contoh tentang apa yang kini disebut pendidikan yang diadaptasikan secara individual. Ada cerita mengenai anak perempuan yang tidak dapat atau tidak ingin belajar teks wajib. Baik orang tuanya maupun kepala sekolahnya memandang anak itu sebagai siswa yang lambat belajar. Namun, pendeta yang bertanggungjawab atas semua sekolah dan siswa di wilayah gerejanya mulai memberikan pelajaran

secara individual kepada anak perempuan itu. Dalam hal ini pendeta tersebut mengkombinasikan buku pelajaran tradisional itu dengan beberapa buku teks lainnya, cerita dan dialog, sambil terus melakukan asesmen bagaimana bermacam-macam materi dan metode berpengaruh terhadap motivasi dan belajar anak perempuan tersebut. Mereka berhasil memotivasi belajar anak itu sehingga dia berhasil mencapai penguasaan yang diwajibkan.⁹

Buku teks pendidikan yang dirancang oleh Pontoppidan itu mengandung sejumlah contoh tentang kesadarannya akan perbedaan individual dalam hal peluang belajar serta berisikan sejumlah rekomendasi tentang metode pengajaran yang tepat untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan individu yang berbeda-beda. Sejumlah kecil contoh gagasan semacam ini ditemukan dalam teks pendidikan selama sejarah pendidikan dasar di abad ke-18 dan ke-19. Teks-teks ini juga menunjukkan adanya pertukaran gagasan antara Norwegia dan negara-negara Nordik serta beberapa bagian Eropa lainnya. Pemikiran-pemikiran para ahli seperti Johan Amos Comenius dari Ceko Slowakia (1592-1670), Francke dari Halle di Jerman yang dan kemudian John Locke dari Inggris (1632-1704), Jean-Jaques Rousseau (1712-1778) dari Perancis dan Johann H. Pestalozzi dari Swiss (1746-1827), ditafsirkan dan dibahas.

⁹ Ibid., h. 47

Beberapa undang-undang tentang sekolah dasar Norwegia ditetapkan pada abad ke-19. Undang-undang tahun 1889, yang menamai sekolah bebas biaya “Sekolah Rakyat”, mempunyai silabus yang setara dengan sekolah swasta yang tidak bebas biaya, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga berada yang tinggal di kota-kota. Namun, pada saat itu beberapa kelompok anak tertentu juga secara eksplisit disebutkan tidak dapat diterima di sekolah. Mereka adalah yang tidak dapat mengikuti pengajaran karena gangguan mental atau fisik, mereka yang mengidap penyakit menular, serta mereka yang berperilaku buruk sekali sehingga dapat berpengaruh buruk atau mencelakai siswa lain. Konsekuensi negatif dari undang-undang tersebut adalah bahwa sekolah tidak dapat berkembang lebih lanjut untuk mampu melayani kebutuhan individu yang berbeda-beda. Sejak itu, sekolah dasar tidak lagi dimaksudkan untuk melayani “semua dan setiap orang”, tetapi hanya melayani mereka yang dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di lain pihak, Model huruf ukiran untuk orang tunanetra ditemukan pada zaman Mesir kuno, dan juga pada zaman Renaissance di Eropa ketika Erasmus dari Rotterdam (1469- 1536) juga menggunakan alfabet ukiran dalam pelatihan keterampilan menulis bagi siswa-siswa yang awas. Informasi lain mengatakan bahwa sejak abad kelima telah ada berbagai kelompok orang tunanetra yang dapat mencukupi dirinya sendiri dan yang mengatur pelatihan pekerjaan internal. Satu contoh tentang mengajarkan membaca bibir kepada orang tunarungu ditemukan di Keuskupan York pada abad kedelapan. Namun, menurut Enerstvedt

(1996), pengetahuan mengenai cara mendidik orang yang tunarungu berat mulai disebarkan dari apa yang disebut “revolusi Spanyol yang tidak begitu terkenal” ke berbagai bagian benua Eropa lainnya dan kepulauan Inggris pada akhir abad ke-16.

Metode pengajaran bagi orang yang menyandang ketunarunguan dan ketunanetraan berat muncul dalam agenda resmi. Paris menjadi tuan rumah yang baik bagi perkembangan berbagai pendekatan khusus, dan minat orang meluas untuk juga mencakup perlakuan bagi penyakit jiwa dan gangguan perkembangan yang parah. Dari Paris gagasan tentang pendidikan khusus menyebar ke seluruh Eropa dan benua lain.

Pada tahun Charles-Michel 1770, de l’Epée (1712-1789) mendirikan sekolah khusus pertama bagi tunarungu di Paris. Dia mendasari pengajarannya pada metode holistik dengan penggunaan bahasa isyarat sebagai komponen sentral. Upaya ini dilanjutkan oleh sejumlah sekolah lain di seluruh Eropa dengan menggunakan berbagai metode pengajaran lain. Di Jerman, Samuel Heinicke (1727-1790) dan penerusnya, Friedrich Hill (1805-1874) mengembangkan yang “metode oral”. Metode tersebut berpengaruh besar pada awal perkembangan pendidikan bagi tunarungu di Norwegia, bersaing dengan sekolah khusus pertama bagi orang tunarungu di mana bahasa isyarat merupakan pendekatan komunikasi yang utama. Denmark adalah negara Nordik pertama dengan sekolah khusus bagi tunarungu, yang pertama didirikan di kota Libeck, yang ketika itu bagian dari Denmark. Di Kopenhagen, anak seorang pastor dari Norwegia, Peter

A. Castberg (1779-1823) mendirikan Lembaga Kerajaan bagi orang tuli-bisu pada tahun 1807. Dia juga adalah kekuatan penggerak yang berada di balik Undang-undang Pendidikan bagi Tunarungu Denmark, undang-undang semacam ini yang pertama di dunia. Salah seorang siswa Castberg, Andreas C. Møller (1796-1874) yang dia sendiri juga tunarungu, mendirikan sekolah pertama semacam ini di Norwegia pada tahun 1825, diikuti oleh beberapa sekolah lain pada tahun 1850-an.

Pada tahun 1784 Valentin Haüy (1745-1822) mendirikan sekolah khusus pertama bagi tunanetra di Paris, Beberapa sekolah seperti ini dibuka di sejumlah negara Eropa lainnya. Swedia adalah salah satu negara Nordik pertama membuka sebuah sekolah bagi siswa yang tunanetra dan tunarungu pada tahun 1809. Di digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Norwegia, lembaga pertama bagi orang tunanetra dibuka pada tahun 1861.

Di Paris, lebih dari sekedar ketunarunguan dan ketunanetraan yang telah menarik perhatian dokter, pendeta dan pendidik. Ibu kota Perancis merupakan pusat aktivitas perintis yang menangani berbagai jenis kecacatan dan kebutuhan khusus, yang saling berkontribusi gagasan. Pada masa itu orang yang dianggap gila dikurung di tempat yang disebut sebagai rumah sakit bersama dengan kriminal, gelandangan dan tahanan politik. Philippe Pinel (1745-1826) membebaskan mereka dan dia mulai memberikan perlakuan, bukan sekedar memenjarakannya. Sejak saat itu, menjadi hal yang sangat penting untuk mendiagnosis dan mengkategorikan berbagai kondisi, seperti perbedaan antara penyakit jiwa dan kelainan perkembangan atau ketunagrahitaan berat.

Edward Seguin (1812-1880) beberapa tahun kemudian mulai mengajar seorang anak laki-laki yang tunagrahita dengan bantuan dari Itard dan Esquirol, Seguin menjadi pendiri sebuah sekolah khusus bagi anak tunagrahita. Dia tidak hanya mencari inspirasi dari pergerakan pendidikan khusus sebelumnya di Paris, tetapi juga dari pemikiran-pemikiran pendidikan umum Comenius, Locke dan Rousseau, juga dari filsafat dan agama Kristen. Dengannya dimulailah era eksperimen pendidikan yang optimistik dalam bidang ketunagrahitaan, yang tersebar luas ke beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat, karena Seguin mengembangkan karyanya lebih lanjut di “Dunia Baru” di seberang lautan Atlantik.¹⁰

Di Norwegia inisiatif pendidikan resmi yang pertama dalam bidang ketunagrahitaan adalah dibukanya sebuah sekolah siang pada tahun 1874, diikuti oleh pendirian sebuah sekolah khusus bagi anak tunagrahita. Salah seorang perintis di sini adalah Johan A. Lippestad (1844-1913). Dalam praktiknya tidak semua anak yang masuk sekolah ini dapat belajar mengikuti silabus yang ditetapkan sebelumnya, akibat tingkat kemampuan intelektual mereka. Karena hal tersebut, seorang perempuan bernama Emma Hjorth (1858-1921) membeli sebidang tanah di luar ibu kota dan mendirikan sebuah lembaga bagi orang tunagrahita berat, yang kemudian dia serahkan kepada kementrian pendidikan.¹¹

Beberapa tahun setelah pendirian sekolah khusus pertama bagi siswa tunagrahita,

¹⁰ Ibid., h. 51

¹¹ Stubs, S, *Inclusive Education Where There Are Few Resources*. (2002: Oslo: The Atlas Alliance), h.88

Norwegia menetapkan undang-undang Pendidikan Khusus pertama, tahun 1881. Ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan sekolah khusus bagi anak-anak tunanetra, tunarungu atau tunagrahita.

Namun, meskipun ada undang-undang ini, mayoritas anak tunagrahita masih tidak mempunyai sekolah selama bertahun-tahun kemudian, walaupun situasinya lebih baik bagi anak-anak yang tunarungu dan tunanetra.

Gelombang pertama minat terhadap pendidikan khusus yang melanda Eropa itu penuh dengan optimisme, sebuah optimisme yang tercermin dalam undang-undang pertama di Norwegia tentang sekolah khusus. Namun, pada saat yang hampir bersamaan dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, sebuah sikap baru dan yang lebih pesimistik muncul dalam perdebatan di Eropa. Sebuah hambatan dibangun di tengah-tengah kelompok anak berkebutuhan khusus dengan mengajukan pertanyaan: siapa yang dapat dididik, dan siapa yang tidak dapat? Sekolah khusus dikembangkan bagi anak-anak yang disebut sebagai anak-anak yang mampu didik sedangkan mereka yang pada waktu itu dianggap tidak mampu didik ditempatkan di lembaga kesehatan dan sosial atau dilupakan.

Dalam hal ini, tulisan-tulisan para ahli ini dibaca dan dibahas juga di negara-negara Nordik, dan mereka mempunyai banyak pengikut. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa pendidikan menjadi kurang terfokus, dan walaupun terfokus, itu adalah beberapa lembaga yang telah didirikan sebelumnya dengan tujuan mendidik dan menyembuhkan. Konsekuensi lainnya adalah bahwa jumlah institusi bertambah dan diberi tanggung jawab baru. Beberapa lembaga baru itu

dibangun di pulau-pulau, untuk mencegah kontak antara orang-orang di lembaga tersebut dengan masyarakat lain, dan untuk melindungi “masyarakat biasa” dari mereka yang dianggap mengalami degenerasi. Upaya ini difokuskan pada orang-orang yang sakit mental dan tunagrahita, dan juga orang-orang yang melanggar hukum atau dianggap tidak bermoral. Namun, adanya institusi-institusi besar tidak biasa di Norwegia ataupun di pulau tetangga, Islandia, tidak seperti di negara-negara Nordik lainnya. Penyebabnya adalah bahwa kedua negara yang jarang penduduknya ini, Norwegia dan Islandia, membangun kesejahteraan sosialnya berdasarkan tradisi lama yaitu secara desentralisasi, sedangkan negara-negara tetangga lain mengikuti tren Eropa. Sikap pesimistik terhadap kemungkinan belajar serta rasa takut akan degenerasi itu dimanifestasikan dalam Undang-undang dan sejumlah buku putih serta dalam berbagai perdebatan resmi, dan tercermin dalam praktek sehari-hari di Norwegia. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa masalah ketunagrahitaan yang parah dikeluarkan dari tanggung jawab kementrian pendidikan. Anak-anak dengan kecacatan tersebut kini dianggap tidak dapat dididik. Pemisahan dari pendidikan itu menjadi total selama beberapa dekade, dan menurut sikap yang pesimistik, mereka tidak dianggap sebagai bagian dari perhatian pendidikan khusus.¹²

Namun demikian, terdapat juga orang lain yang mempunyai sikap yang lebih sayang terhadap anak-anak dan remaja yang dengan berbagai alasan tidak ikut dalam institusi masyarakat biasa, yang bersaing untuk diperhatikan dalam debat

¹² Johnsen, B. H. & Skjorten, M. D., op.cit., h. 100

resmi. Salah satu pertanyaan klasik dalam perdebatan itu adalah apakah yang harus dilakukan terhadap mereka yang tidak bersekolah? Ini merupakan sebuah pertanyaan serius di Norwegia dan Denmark di mana sekolah dasar telah diwajibkan sejak tahun 1739 dan di mana undang-undang menuntut hukuman bagi orang tua dan juga remaja yang melanggar hukum.

Terdapat banyak alasan mengapa ada anak yang tidak bersekolah. Alasan yang umum adalah resistensi orang tua terhadap institusi baru yang didirikan oleh Raja. Tetapi ada alasan lain. Mungkin keluarganya sangat miskin sehingga anak tidak mempunyai pakaian yang pantas atau mungkin mereka bekerja di luar keluarga atau menjaga adik di rumah, atau mungkin mereka ditahan di rumah karena keluarganya tidak percaya bahwa anaknya dapat belajar hal-hal yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dituntut oleh sekolah.

Pada tahun 1850-an dukungan bagi anak dan remaja yang tidak bersekolah atau menganggur, dan bagi mereka yang telah melanggar hukum dengan cara lain, dibahas dari sudut pandang yang berbeda. Terhadap anak muda pelanggar hukum, sikap yuridis yang ketat mendapatkan dukungan resmi. Akibatnya, anak hingga usia sepuluh tahun dapat di kirim ke penjara. Akan tetapi, ketetapan lama tentang bolos sekolah tidak dikeluarkan dari Undang-Undang Pendidikan baru tahun 1848 dan 1860. Namun, tidak satupun dari Undang-Undang ini dikeluarkan tanpa diskusi yang hangat. Juru bicara pendidikan berargumen bahwa belajar adalah tindakan sukarela dan oleh karenanya tidak dapat

dipaksakan. Sejumlah upaya dilakukan dengan inspirasi dari pergerakan *philantropis* di Inggris dan benua Eropa.

Pergerakan penyelamatan anak ini mempunyai pendukung di kepulauan Britania. Ini tidak aneh, mengingat bahwa Revolusi Industri dimulai di Inggris dan anak-anak telah lama dimanfaatkan dan disalahgunakan sebagai tenaga kerja. Di kalangan para penguasa, pada awalnya sikapnya positif terhadap meluasnya penyalahgunaan sejumlah besar anak dari keluarga miskin itu. Bahkan filosof John Locke merekomendasikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin sebaiknya mulai masuk ke sekolah industri pada usia tiga tahun dalam kombinasi antara berlatih dan bekerja dalam industri yang sedang tumbuh itu. Akan tetapi, di samping itu, dia juga adalah salah seorang pemrakarsa dalam lingkaran orang-orang kaya yang mengemukakan bahwa anak dan masa kanak-kanak merupakan satu bagian yang khusus dari masa kehidupan dengan kualitasnya sendiri. Padahal, Locke dan kemudian Rousseau memulai sebuah gelombang minat dalam menciptakan kondisi perkembangan yang positif bagi anak. Kesenjangan antara sejumlah besar anak yang dieksploitasi dan anak-anak dari keluarga kaya yang memperoleh keistimewaan itu menjadi sangat tidak menyenangkan. Pada awal abad ke-19 didirikanlah apa yang disebut masyarakat *filantropik*¹³ oleh

¹³ Gerakan masyarakat dimana semua kegiatan kedermawanan masyarakat seperti kegiatan menyumbang atau memberikan bantuan baik dilakukan oleh individu maupun oleh organisasi dan perusahaan. Ada beberapa motivasi atau alasan masyarakat melakukan kegiatan *filantropi*, beberapa di antaranya adalah: *Alasan Keagamaan*, yaitu motivasi melakukan kegiatan kedermawanan atau kepedulian karena kesadaran bahwa perbuatan seperti itu diperintahkan atau dianjurkan oleh ajaran agamanya masing-masing. *Alasan Kemamusiaan*, yaitu motivasi melakukan kegiatan kedermawanan atau kepedulian karena kesadaran bahwa setiap manusia harus hidup serasi dan harmonis dengan

kalangan borjuis, yang memfokuskan perhatiannya pada peningkatan kondisi anak-anak miskin. Tujuannya adalah untuk mendidik mereka menjadi warga negara yang memiliki sikap yang sama dengan golongan yang berkuasa. Upaya ini didasari oleh keyakinan bahwa setiap orang dapat menjadi kaya jika mereka bekerja keras dan hidup menurut standar moral yang tinggi.¹⁴

Ketertarikan para dermawan pada anak dari kelas bawah ini menyebar ke negara-negara Eropa lainnya dan cenderung disesuaikan dengan kondisi sosial budaya tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini mengarah pada pendirian sekolah dasar di beberapa negara, baik atas nama negara seperti di Norwegia dan Denmark seabad sebelumnya, maupun disponsori oleh berbagai organisasi amal. Gelombang penyelamatan anak juga sampai ke Norwegia. Masyarakat filantropik didirikan, artikel-artikel mengenai masalah ini diterjemahkan dan diterbitkan pada jurnal-jurnal baru, ide-ide dibahas dan diimplementasikan. Pada saat yang hampir bersamaan dengan ditetapkannya undang-undang kriminal yang ketat, “institusi penyelamatan anak” pertama pun mendapatkan titik terang. Tujuannya adalah untuk “menyelamatkan anak-anak

manusia lainnya. Alasan *Ketaatan Aturan*, yaitu motivasi melakukan kegiatan kedermawanan atau kepedulian karena adanya suatu aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Alasan *Komersial*, yaitu motivasi melakukan kegiatan kedermawanan atau kepedulian karena alasan-alasan bisnis. Alasan *Kompensasi Pajak*, yaitu motivasi melakukan kegiatan kedermawanan atau kepedulian karena alasan bahwa sumbangan sosial yang dilakukan oleh perusahaan atau individu akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau individu tersebut.

¹⁴ www.idp-europe.org

yang secara moral terabaikan, menyelamatkan jiwa anak dan untuk mengurangi hukum gantung dan penjara semaksimal mungkin".¹⁵

Di Bergen, kota utama di pesisir barat Norwegia, organisasi yang menamakan diri "masyarakat untuk penyelamatan anak dan remaja yang kurang bermoral" memilih untuk mengirim anak-anak pelanggar hukum ini ke keluarga "baik-baik" di komunitas tetangga. Di sana mereka diharapkan mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang sehat dan baru untuk pekerjaan yang bermanfaat. Model ini sejalan dengan tradisi Norwegia dalam menemukan solusi yang terdesentralisasi sebagaimana disebutkan di muka.

Jumlah sekolah khusus meningkat di Eropa selama abad ke-19 dan 20. Dan peningkatan terjadi pula pada jumlah kebutuhan khusus yang teridentifikasi dan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id dikategorikan, yang selanjutnya mengarah pada pendirian sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga yang lebih terspesialisasi berdasarkan jenis kecacatan dan kesulitan yang dihadapi anak. Sebagian dari sekolah-sekolah ini swasta dan yang lainnya sekolah negeri.

Dukungan pengajaran ekstra bagi siswa yang ketinggalan oleh sebagian besar anggota kelasnya sudah dibahas sejak tahun 1850-an di ibu kota Norwegia. Variasi tingkatan pengetahuan dan keterampilan siswa-siswa itu sangat besar sehingga kepala sekolah mengeluh tentang banyaknya penggunaan waktu untuk mengulang materi yang sangat mendasar. Penyebab keadaan tersebut banyak sekali, diantaranya adalah frekuensi membolos di kalangan anak-anak itu tinggi

¹⁵ Ibi., 155

karena keluarga membutuhkan anaknya di rumah atau untuk bekerja. Di samping itu, ada anak yang tidak bersekolah karena tertular penyakit epidemik, yang sebagian disebabkan oleh kekurangan gizi dan buruknya kondisi kebersihan. Selain itu, sebagian siswa adalah anak yang lambat belajar atau mengalami kesulitan belajar lainnya. Tidak ada tindakan permanen yang dilakukan pada saat itu mengenai pengaturan pengajaran khusus, tetapi perdebatan mengenai hal itu telah dimulai.

Satu dekade kemudian, pada tahun 1860, kelas khusus pertama didirikan di Drammen, sebuah kota dekat ibu kota. Kelas baru tersebut dimaksudkan bagi anak-anak yang “terabaikan dan yang dapat terabaikan”, sebagaimana diistilahkan pada saat itu. Kelas khusus ini menandai titik awal pengorganisasian kelas remedial di Norwegia dan Eropa. Akan tetapi, tidak sampai satu abad kemudian, tahun 1955, pengajaran remedial dilembagakan dan dijamin secara finansial oleh undang-undang pendidikan dasar Norwegia.¹⁶

Awal abad ke-20 wacana mengenai pendidikan anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus telah muncul dan diperdebatkan. Heinrich Hanselmann (1882-1960) dari Swiss adalah seorang pelopor dalam pendirian pendidikan kebutuhan khusus sebagai satu disiplin ilmu yang mandiri dengan pendidikan profesionalnya sendiri. Pendidikan kebutuhan khusus digambarkan sebagai sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan pendidikan umum, filsafat, sosiologi, psikologi, dan kedokteran.. Dia merekomendasikan pendidikan khusus bagi

¹⁶ Ibid., h.157

mereka yang dipandang sebagai mampu didik, sedangkan mereka yang dipandang tidak mampu didik dirujuk ke lembaga-lembaga tertentu untuk mendapat perawatan dan pengasuhan. Buku-buku tulisan Hanselmann dibaca secara luas oleh para pendidik khusus di negara-negara Nordik, dan buku-buku tersebut berpengaruh besar pada perkembangan disiplin ilmu tersebut di Norwegia.

Cendekiawan lainnya, yang baru dikenal di dunia barat pada tahun-tahun kemudian adalah Lev Vygotsky (1896- 1934) dari Rusia. Kritiknya mengenai asesmen psikometrik terhadap anak-anak serta fokusnya pada zona perkembangan proximal bagi tiap individu anak telah memberikan inspirasi bagi banyak proyek inovasi praktis terhadap kelas-kelas sekarang ini. Sejak digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id zamannya, ide-idenya berpengaruh penting pada pendidikan kebutuhan khusus di Soviet dan Eropa Timur.¹⁷

Pada tahun 1970, sebuah komisi dari Departemen Pendidikan, Penelitian dan Gereja (KUF 1970) menerbitkan sebuah laporan yang menjadi titik balik dalam wacana tentang pendidikan umum maupun pendidikan kebutuhan khusus di Norwegia. Dokumen tersebut terkenal sebagai Blom Report; namanya diambil dari nama ketuanya komisi tersebut, Knut Blom. Dalam laporan ini prinsip integrasi diperkenalkan secara eksplisit dan didefinisikan secara jelas. Kriteria integrasi adalah sebagai berikut:

1. Rasa memiliki /dimiliki dalam masyarakat sosial.

¹⁷ Ibid

2. Partisipasi demi kepentingan masyarakat
3. Tanggung jawab bersama atas tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban.

Konsekuensi dari laporan tersebut adalah bahwa undang-undang sekolah khusus yang segregatif dihapus, dan masalah pendidikan siswa yang berkebutuhan khusus diintegrasikan ke dalam perundang-undangan pendidikan reguler. Sejak itu tujuan umumnya adalah satu sekolah untuk semua, dan bahwa semua siswa harus mulai pendidikan dasar mereka di sekolah setempat di lingkungannya sendiri. Ini menuntut perubahan yang besar dalam aktivitas di dalam kelas dan sekolah. Sejalan dengan Laporan Blom itu, sebuah kurikulum nasional baru, yang sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, dikembangkan. Sementara kurikulum lama lebih menyerupai silabus yang terdiri dari berbagai keterampilan dan pengetahuan wajib yang konkrit, kurikulum baru lebih terbuka dan fleksibel, memberikan kebebasan yang luas kepada guru profesional dalam hal pemilihan materi dan metodenya. Dengan kurikulum nasional yang memiliki kerangka kerja yang luas tersebut, kurikulum dapat diadaptasikan dengan kebutuhan khusus siswa, dan kurikulum kelas dapat dibuat dengan cukup luas untuk melibatkan semua siswa dalam aktivitas pendidikannya.¹⁸

Sekolah untuk semua menjadi konsep kunci dalam wacana pendidikan kebutuhan khusus di Norwegia dan negara-negara Nordik lainnya. Organisasi-

¹⁸ Tarsidi, D, *The implementation of Inclusive Education in Indonesia*. Makalah disajikan pada The 8th International Congress on Including Children with Disabilities in the Community. Stavanger, Norway, 15-17 Juni 2003.

organisasi non pemerintah, seperti asosiasi untuk tunagrahita, menyelenggarakan berbagai lokakarya tentang cara mengembangkan sekolah untuk semua, baik pada tingkat lokal, nasional maupun Nordik. Kelompok target untuk informasi dan argumentasi mereka adalah para politisi dan pejabat lainnya, orang tua serta guru dan pendidik khusus di sekolah reguler maupun sekolah khusus. Sejumlah besar guru reguler meningkatkan kemampuannya sendiri melalui perguruan tinggi di bidang pendidikan kebutuhan khusus agar dapat lebih baik menerima siswa dengan berbagai kebutuhan di kelasnya. Walaupun prinsip-prinsip integrasi dan satu sekolah untuk semua diakui secara meluas, tetapi terdapat juga resistensi. Di antara yang skeptis adalah para profesional yang bekerja di sekolah khusus dan institusi lain sejenisnya. Tidak semua orang tua yakin bahwa ini adalah cara yang benar untuk memberikan layanan bagi anaknya yang menyandang kecacatan, dan mereka mulai mendirikan asosiasinya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan Blom menandai titik balik resmi yang eksplisit mengenai hak pendidikan bagi anak dan remaja penyandang cacat di Norwegia. Sejak itu perkembangannya adalah meninggalkan segregasi dan bergerak menuju integrasi dan inklusi. Sekolah dasar reguler serta sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas terbuka bagi semua anak dan remaja, termasuk mereka yang sebelumnya berada di sekolah segregasi atau dikecualikan dari layanan pendidikan karena gangguan perkembangan yang parah. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sekolah dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dan

kebutuhan khusus. Pusat-pusat layanan pendidikan dan psikologis lokal membantu sekolah-sekolah dalam melakukan asesmen dan merencanakan pendidikan kebutuhan khusus berdasarkan manajemen kelas. Sebuah sistem pendukung pendidikan kebutuhan khusus nasional, yang terdiri dari unit-unit yang berlokasi di berbagai bagian negeri, mengumpulkan dan mengembangkan pengetahuan baru dalam bidang-bidang yang spesifik dalam area spesifik pendidikan kebutuhan khusus. Penelitian dan pendidikan tinggi di bidang tersebut ditawarkan di beberapa lembaga pendidikan keguruan, dan jurusan Pendidikan Kebutuhan Khusus di Universitas Oslo menawarkan pendidikan pada semua jenjang, termasuk program Doktorat.¹⁹

Perubahan ideologi ini berkembang sebagai satu fenomena umum yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id terkait dengan sistem kesejahteraan sosial-demokratik di negara-negara Nordik yang telah berkembang selama abad ke-20. Kontribusi Norwegia adalah integrasi dalam pendidikan seperti dijelaskan di atas. Namun, beberapa tahun sebelumnya Denmark dan Swedia membuka wacana tersebut. Integrasi dan normalisasi merupakan konsep kunci pada tahap awal ini. Implementasi pertama prinsip normalisasi itu diprakarsai di Denmark oleh Niels Bank-Mikkelsen pada tahun 1959, bekerjasama dengan para orang tua anak yang tunagrahita. Pada saat memegang posisi pimpinan di Departemen Sosial, Bank-Mikkelsen mendengarkan suara-suara orang tua yang tidak ingin menyerahkan anaknya yang menyandang kecacatan itu di institusi. Tetapi mereka meminta disediakan

¹⁹ Ibid

layanan lokal agar dapat mendidik anaknya di rumah dengan bantuan profesional untuk memberikan habilitasi, pembelajaran dan perkembangan. Bengt Nirje dari Swedia memberikan penjelasan yang sistematis tentang konsep normalisasi ini.

Konsep normalisasi²⁰ pada saat itu muncul. Ide pertama ini menyebar ke seluruh dunia barat. Di Amerika Serikat, Wolf Wolfensberger mengadaptasikan konsep normalisasi ini ke masyarakat Amerika. Universitas Syracuse, di mana Wolfensberger bekerja, menjadi sebuah inkubator bagi para cendekiawan yang berargumen dan melakukan penelitian di bidang normalisasi dan kebutuhan khusus.

Tahun 1960-an, 70-an dan 80-an ditandai dengan meningkatnya keinginan orang untuk mendukung budaya masyarakat sejahtera yang tersembunyi, kecil, lemah atau berkekurangan yang terpencar-pencar. Pada saat yang bersamaan, wacana resmi dunia barat meledak dalam fokus baru yang kuat pada hak-hak azasi manusia dan demokrasi di luar evolusi materialistik pada beberapa dekade pertama paska perang dunia pertama. Konsep demokrasi menjadi berarti lebih dari sekedar parlementarianisme dan politik kepartaian. Titik tolak konkret dari gelombang perubahan mentalitas ini adalah yang disebut “Prague Spring” (musim semi Praha) pada tahun 1968, dan demonstrasi gabungan antara kaum buruh dan mahasiswa di Universitas Sorbonne di Paris pada tahun yang sama. Para juru bicaranya, yang disebut “sixty-eighters”, mendapatkan ide-idenya dari

²⁰ Gerakan normalisasi didasarkan filosofi bahwa setiap individu (anak berkebutuhan khusus) sedapat mungkin diberikan pendidikan dan lingkungan hidup yang normal.

berbagai tradisi di berbagai bagian dunia. Pejuang hak azasi manusia di Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Pendeta Martin Luther King, yang menyiapkan ladangnya. Melalui perlawanan untuk mendapatkan kesamaan hak mereka sebagai warga masyarakat Amerika, orang-orang Afro-Amerika memasukkan integrasi ke dalam agenda perjuangannya. Integrasi dan kesamaan hak azasi manusia menjadi isu utama dalam perjuangan kelompok-kelompok minoritas lainnya, dalam pergerakan kebebasan wanita, dalam perdebatan mengenai hak-hak penyandang cacat yang mulai berkembang.²¹

Jadi sebenarnya, perubahan ideologi dalam wacana tentang pendidikan kebutuhan khusus merupakan bagian dari wacana tentang hak azasi manusia serta wacana tentang integrasi yang lebih luas, dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Ini merupakan pergerakan yang dimulai dari “tingkat masyarakat” hingga didirikannya asosiasi orang tua serta kolaborasinya dengan para profesional di lapangan. Kelompok target utama bagi kampanye informasi mereka adalah para politisi. Hak-hak harus dijamin melalui undang-undang. Wacana tentang hak-hak azasi para penyandang cacat dan mereka yang berkebutuhan pendidikan khusus mencapai PBB beserta organisasi-organisasinya. Hak semua anak atas pendidikan, termasuk hak mereka yang berkebutuhan khusus, kemudian menjadi fokus dalam sejumlah deklarasi, seperti deklarasi PBB tentang Hak Azasi Manusia tahun 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, pernyataan Konferensi Dunia di Jomtien, Thailand, tahun 1990, di mana Pendidikan untuk

²¹ Rogers., *op.cit.* h. 159

Semua disepakati, Peraturan Standar tentang Kesamaan Kesempatan bagi para penyandang Cacat yang diterbitkan tahun 1994, dan akhirnya Pernyataan Salamanca UNESCO tentang Pendidikan inklusif, yang disepakati di Spanyol tahun 1994 dalam pernyataan Salamanca ditegaskan komitmen terhadap anak pendidikan untuk semua, yaitu pentingnya mendirikan pendidikan bagi anak, remaja, dan orang dewasa yang memerlukan pendidikan di dalam sistem reguler, dan menyetujui suatu kerangka aksi mengenai pendidikan kebutuhan khusus, yang semangat dan ketetapan-ketetapan serta rekomendasi-rekomendasinya diharapkan dijadikan pedoman oleh pemerintah-pemerintah serta organisasi-organisasi dalam menjamin setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas demi kehidupan yang bermartabat.²²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deklarasi Salamanca menjadi semangat baru untuk pendidikan inklusi. Pada tahun-tahun setelah konferensi Salamanca, beberapa negara di dunia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip dari pernyataan Salamanca tersebut, baik seluruhnya ataupun sebagian, ke dalam perundang-undangan atau dokumen kebijakan. negara-negara tersebut sangat bervariasi, seperti Austria, Cina, Ghana, Hongaria dan Uganda. Sejak itu, wacana pendidikan inklusi berkembang meskipun masih banyak terjadi pro dan kontra apakah anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan khusus atau dapat bersekolah dengan anak-anak yang “normal”. Seperti halnya, Bagi negara-negara tertentu, prinsip-prinsip pendidikan integrasi dan inklusi itu diambil dari pernyataan-pernyataan internasional dan

²² J. David Smith, *op.cit.*, h.19

dimasukkan langsung ke dalam dokumen kebijakan resmi. Beberapa organisasi non-pemerintah di negara-negara tersebut telah menyiapkan diskusi mengenai prinsip-prinsip tersebut, sering kali diprakarsai oleh organisasi terkait dari negara-negara barat. Namun, di beberapa negara pergerakan di tingkat masyarakat tersebut tidak begitu kuat, walaupun upayanya tulus. Pada fase awal perubahan ideologi ini, alur informasi dan penetapan keputusan di negara-negara ini pada umumnya bersifat pergerakan *top-down*, yang berbeda dari pergerakan *bottom-up* di negara-negara Nordik, dari asosiasi orang tua ke politisi.

E. Komponen-Komponen Pendidikan Inklusi

Adapun beberapa komponen yang perlu diperhatikan agar pendidikan Inklusi dapat berjalan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut²³:

1. Lingkungan, termasuk sikap terhadap anak-anak pada umumnya dan terhadap anak tertentu karena lingkungan mempunyai dampak yang besar bagi suksesnya pendidikan inklusi. Masalah lingkungan diantaranya berkaitan dengan beberapa masalah diantaranya: lingkungan yang tidak responsif dan kurang stimulasi, pemahaman atau kesalahpahaman guru akan proses pembelajaran, pendekatan pengajaran dan materi pembelajaran yang dipergunakan atau diterapkan oleh lingkungan pendidikan, sedangkan faktor-

²³ Miriam Donath Skjørten, *Memuju Inklusi dan Pengayaan*, dalam Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjørten (Editor), i, (Bandung, atas kerjasama antara Departemen Pendidikan Nasional, Braillo Norway dan Universitas Pendidikan Indonesia [UPI], 2003), h.8.

faktor lingkungan yang terakhir umumnya berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik di masa lalu dan sekarang.

2. Faktor-faktor dalam diri anak/peserta didik mencakup: keingintahuan, motivasi, inisiatif, interaksi dan komunikasi, kompetensi sosial, kreatifitas, temperamen, dorongan untuk belajar dan gaya belajar, kemampuan.
3. Hakikat dan tingkat kecacatan yang akan menjadi obyek pendidikan inklusi. Aspek kecacatan ini merupakan bagian dari gambaran tentang peserta didik.

Dari poin-poin di atas kita dapat melihat bahwa hambatan belajar dapat terjadi juga ketika tidak ada kecacatan terlibat di sana. Kita juga dapat melihat kompleksitas dan multiplisitas kondisi pembelajaran itu. Diharapkan dengan mempertimbangkan semua komponen-komponen ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang keunikan setiap individu peserta didik serta meminimalisir hambatan dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi.

Sebab secara teoritis dalam konsep “hambatan belajar dan perkembangan” menarik perhatian kita pada kesulitan dan tantangan yang dapat muncul di setiap kelas, kesulitan-kesulitan yang dapat dihadapi oleh semua anak. Selain itu, konsep ini juga membantu kita menyadari besarnya implikasi dari hambatan belajar yang disebabkan oleh faktor sensori, motorik, kognitif, emosional dan lingkungan. Ini membantu kita menyadari bahwa, misalnya, penguasaan Braille oleh seorang anak tunanetra tidak mengatasi semua hambatan akibat ketunanetraannya.

F. Fungsi Pendidikan Inklusi

Dilihat dari fungsinya, ada beberapa fungsi dari pendidikan inklusi diantaranya adalah sebagai berikut²⁴:

1. Special Education

Special education yang pada umumnya diterjemahkan sebagai pendidikan luar biasa sebagaimana yang sering dipahami dulu adalah pendidikan yang menyediakan seting khusus seperti kelas khusus, sekolah khusus dan sekolah atau lembaga khusus dengan pengasramaan.

2. Integrasi

Integrasi siswa penyandang cacat dengan anak-anak atau sekolah reguler telah dilakukan selama bertahun-tahun dan dengan cara yang berbeda-beda. Anak-anak penyandang cacat yang mengikuti kelas atau sekolah khusus dipindahkan ke sekolah reguler ketika mereka dianggap siap untuk mengikuti suatu kelas di sekolah reguler. Mereka sering ditempatkan dalam suatu kelas berdasarkan tingkat keberfungsian dan pengetahuannya bukan menurut usianya. Misalnya kita dapat menemukan anak berusia 12 tahun berada di kelas satu.

Secara teoritis terdapat bermacam-macam model integrasi. Model-model ini beragam dari pertemuan yang sesekali dan jarang hingga menjadi anggota penuh dari sebuah kelas reguler. Contoh model-model tersebut diantaranya adalah dalam hal:

²⁴ Ibid, h.9-13.

- a. Integrasi dalam acara-acara kebudayaan tertentu;
- b. Integrasi fisik. Dimana siswa penyandang cacat hanya terlihat berada satu kompleks bersama-sama dengan siswa non-cacat. Mempunyai waktu istirahat yang bersamaan, saling bertemu satu sama lain. Siswa penyandang cacat ditempatkan di kelas reguler tanpa perhatian ekstra terhadap kebutuhan akademisnya.
- c. Partisipasi yang sistematis atau sporadis bagi siswa penyandang cacat tertentu atau untuk pelajaran-pelajaran tertentu di kelas reguler. Misalnya untuk kegiatan musik, keterampilan atau olahraga.
- d. Partisipasi reguler di kelas reguler untuk mata pelajaran tertentu.

3. Inklusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam lingkungan masyarakat inklusif, kita siap mengubah dan menyesuaikan sistem, lingkungan dan aktivitas yang berkaitan dengan semua orang lain serta mempertimbangkan kebutuhan semua orang. Bukan lagi anak yang menyandang kecacatan yang harus menyesuaikan diri agar cocok dengan seting yang ada. Untuk ini diperlukan fleksibilitas, kreativitas dan sensitivitas.

G. Tujuan Pendidikan Inklusi

Secara teoritis, ditinjau dari segi pelaksanaannya tujuan pendidikan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu: *pertama, tujuan operasional*. Tujuan operasional adalah suatu tujuan yang dapat dicapai menurut program yang telah ditentukan/ditetapkan dalam kurikulum. *Kedua, tujuan fungsional*. Tujuan

fungsional yaitu tujuan yang telah dicapai dalam arti kegunaannya, baik dari aspek teoritis maupun dari aspek praktis, meskipun kurikulum secara operasional belum tercapai.²⁵

Sedangkan di Indonesia tujuan pendidikan seperti yang tercantum Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 berbunyi: Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab²⁶.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan pendidikan inklusi yang paling penting dari perubahan-perubahan ini adalah pengakuan dan penghargaan akan adanya *keragaman*. Hal ini juga menghasilkan upaya-upaya untuk “membawa kembali” ke dalam masyarakat mereka yang sebelumnya telah dipisahkan atau disegregasikan oleh mayoritas terbesar masyarakat karena mereka berbeda. Diantara yang telah dipisahkan tersebut kita temukan anak-anak yang mempunyai hambatan belajar dan perkembangan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan

²⁵ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam 1 Untuk IAIN, STAIN, PT AIS*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998) h.48.

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung, Citra Umbara, 2003), h.7

diantaranya oleh kecacatan. Tetapi dalam konteks pendidikan inklusi ini bukan hanya oleh kecacatan saja.

H. Prasyarat Keberhasilan Pendidikan Inklusi

Agar pendidikan inklusi berhasil legislasi dan peraturan saja tidak cukup. Sebab proses menuju inklusi itu sangat panjang dan memerlukan komitmen yang kuat dari semua unsure penyelenggara pendidikan. Adapun beberapa prasyarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan hati dan sikap.
2. Reorientasi yang berkaitan dengan asesmen, metode pengajaran dan manajemen kelas termasuk penyesuaian lingkungan.
3. Redefinisi peran guru dan realokasi sumber daya manusia.
4. Redefinisi peran SLB (Sekolah Luar Biasa) yang ada. Misalnya, dapatkah sekolah-sekolah ini secara bertahap mulai berfungsi sebagai pusat sumber yang ekstensif.
5. Penyediaan bantuan profesional bagi para guru dalam bentuk : *pertama*, reorientasi pendidikan guru sehingga guru-guru baru dapat memberikan kontribusi kepada proses menuju inklusi dan bersikap fleksibel jika diperlukan. *Kedua*, reorientasi pelatihan dalam jabatan dan penataran guru, kepala sekolah dan guru kelas sehingga mereka juga akan dapat memberikan kontribusi terhadap proses menuju inklusi dan bersikap fleksibel jika diperlukan. *Terakhir*, layanan guru kunjung menurut kebutuhan.

6. Pembentukan, peningkatan dan pengembangan kemitraan antara guru dan orang tua, demi saling reorientasi dan melakukan peningkatan serta pertukaran pengalaman, bantuan dan nasehat.
7. Pendidikan Inklusi juga akan memerlukan sistem pendidikan yang fleksibel termasuk kurikulum dan sistem ujian yang fleksibel.

I. Pengalaman Penerapan Pendidikan Inklusi di Indonesia

Proses menuju pendidikan inklusi di Indonesia diawali pada awal tahun 1960-an oleh beberapa orang siswa tunanetra di Bandung dengan dukungan organisasi para tunanetra sebagai satu kelompok penekan. Pada masa itu SLB untuk tunanetra hanya memberikan layanan pendidikan hingga ke tingkat SLTP. Sesudah itu para pemuda tunanetra diberi latihan kejuruan dalam bidang kerajinan tangan atau pijat. Sejumlah pemuda tunanetra bersikeras untuk memperoleh tingkat pendidikan lebih tinggi dengan mencoba masuk ke SMA biasa meskipun ada upaya penolakan dari pihak SMA itu. Lambat-laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra.

Pada akhir tahun 1970-an pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi, dan mengundang Helen Keller International, Inc. untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi. Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor

002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat yang mengatur bahwa anak penyandang cacat yang memiliki kemampuan seyogyanya diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan sebayanya yang non-cacat di sekolah biasa. Sayangnya, ketika proyek pendidikan integrasi itu berakhir, implementasi pendidikan integrasi semakin kurang dipraktekkan, terutama di jenjang SD.

Akan tetapi, menjelang akhir tahun 1990-an upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusi melalui proyek kerjasama antara DEPDIKNAS dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB. Agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dengan program pendidikan integrasi yang nyaris mati, perhatian diberikan pada sustainabilitas program pengimplementasian pendidikan inklusi. Untuk itu, strategi yang diambil adalah sebagai berikut.

1. Diseminasi ideologi pendidikan inklusif melalui berbagai seminar dan lokakarya;
2. Mengubah peranan SLB yang ada agar menjadi pusat sumber untuk mendukung sekolah inklusif (dengan alat bantu mengajar, materi ajar, metodologi, dsb.);
3. Penataran/pelatihan bagi guru-guru SLB maupun guru-guru reguler untuk memungkinkan mereka memberikan layanan yang lebih baik kepada anak berkebutuhan khusus dalam setting inklusi;

4. Reorientasi pendidikan guru di LPTK dan keterlibatan universitas dalam program tersebut;
5. Desentralisasi pembuatan keputusan untuk memberikan lebih banyak peran kepada pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan inklusif;
6. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok kerja untuk mempromosikan implementasi pendidikan inklusif;
7. Keterlibatan LSM dan organisasi internasional dalam program ini;
8. Menjalin jejaring antar berbagai pihak terkait;
9. Mengembangkan sekolah inklusif perintis;
10. Pembukaan program magister dalam bidang inklusi dan pendidikan kebutuhan khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil yang paling dapat teramati dari program tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sejumlah lokakarya dan seminar tentang pendidikan inklusif, baik pada tingkat nasional maupun lokal, telah diselenggarakan, yang melibatkan para pendidik dan pengelola pendidikan.
2. Sembilan SLB di sembilan provinsi telah dipilih untuk menjadi pusat sumber dan perannya sebagai pusat sumber sedikit demi sedikit menjadi kenyataan dengan tetap mempertahankan peranannya sebagai SLB. Pusat Sumber Daya Nasional di Jakarta, Citeureup Pusat Sumber Daya Daerah di Jawa Barat dan Payakumbuh Regional Resource Centre di Sumatera Barat adalah tiga paling

fungsional di antara sembilan pusat sumber daya. Selain itu, sejumlah sekolah khusus lainnya telah dirancang untuk berfungsi sebagai pusat mendukung.

3. Beberapa universitas sudah mulai memperkenalkan pendidikan inklusif sebagai satu mata kuliah atau sebagai satu topik dalam mata kuliah terkait kepada mahasiswanya.
4. Dosen sejumlah universitas sudah terlibat dalam lokakarya atau seminar tentang pendidikan inklusif.
5. Dinas Pendidikan di sejumlah propinsi sudah lebih proaktif dalam mempromosikan pendidikan inklusif.
6. Sebuah kelompok kerja pendidikan inklusif telah terbentuk di Jawa Barat, yang anggotanya berasal dari Pusat Sumber Citeureup, Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan UPI.
7. Sejak tahun 2001, pemerintah mulai uji coba perintisan sekolah Inklusif seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 12 sekolah di daerah Gunung Kidul dan di Provinsi daerah Khusus Ibukota Yogyakarta dengan 35 sekolah. Pada sekolah-sekolah reguler yang dijadikan perintis itu memang diutamakan anak-anak lambat belajar dan anak-anak sulit belajar sehingga perlu mendapat pelayanan khusus. Karena masih dalam tahap rintisan sampai sekarang belum ada informasi yang berarti dari sekolah-sekolah tersebut.²⁷

²⁷ <http://bk3sajatim.org/?p=148>

8. UNESCO telah aktif terlibat dalam promosi pendidikan inklusi di Jawa Barat. Pada tahun 2002 proyek telah mengembangkan masing-masing tiga sekolah inklusif perintis di 9 propinsi yang memiliki Pusat Sumber, dan pada tahun 2003 Depdiknas secara ambisius meningkatkan jumlah tersebut. Sejak saat itu sekitar 2000 anak penyandang cacat sudah ditempatkan di sekolah reguler.
9. Program magister inklusi dan pendidikan kebutuhan khusus dibuka di UPI dengan bantuan teknis dari Universitas Oslo.

Indonesia Menuju Pendidikan Inklusi Secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang cacat anak. Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.²⁸ Setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.²⁹

²⁸ UU RI No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat Pasal 6 ayat 1

²⁹ Ibid., Pasal 6 ayat 6

J. Alasan Pentingnya Penerapan Pendekatan Pendidikan Inklusi

Melihat pentingnya penerapan pendekatan pendidikan inklusi bisa dilihat dari berbagai faktor. Dari sudut pandang hak asasi manusia, adalah untuk menghilangkan segregasi dengan mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus dan memenuhi haknya ditengah-tengah anak normal. Kemudian dari sudut pandang ekologis, pada dasarnya orang, situasi, dan kejadian tidak akan memiliki maknanya sendiri, tanpa diberikan pemaknaan kepada hal-hal tersebut. Maka apabila anak berkebutuhan khusus dilarang untuk bersekolah di sekolah reguler dengan anak “normal” lainnya, maka secara tidak langsung akan terjadi pelabelan. Pelabelan terhadap anak yang mendapat layanan khusus akan memberi pengaruh yang negatif, mereka akan merasa berbeda dan menjadi rendah diri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K. Hubungan Pendidikan Islam Dan Pendidikan Inklusi

Dari kedua penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara pendidikan inklusi dan pendidikan Islam adalah bersifat saling mendukung dan memperkuat satu dengan yang lain. Dalam artian bahwa pendidikan Islam memberikan ruang bagi pencerdasan terhadap setiap umat manusia tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, kondisi tubuh (kecacatan yang dimiliki) dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita lihat dari pengertian pendidikan Islam sendiri, seperti yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani bahwa Pendidikan Agama Islam adalah proses pengubahan tingkah laku individu pada kehidupan pribadi masyarakat dan alam sekitarnya. Dengan cara pengajaran

sebagai suatu aktivitas asasi sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.³⁰

Artinya dalam menuntut ilmu dan melaksanakan pendidikan ditujukan untuk *pertama*, mengubah tingkah laku individu. Dengan harapan dapat meningkatkan harkat dan martabatnya baik di mata Allah maupun sesama manusia dalam konteks interaksi sosial. *Kedua*, ilmu yang telah didapatkan diharapkan dapat berfungsi untuk menjaga mempertebak keimanan kepada Allah, menjaga keseimbangan alam dan keharmonisan antara sesama umat manusia. Dan lain sebagainya, dimana pada intinya Islam memberikan apresiasi yang besar bagi dunia pendidikan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan inklusi diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, implementasi sangat tergantung pada sikap, pengetahuan, fleksibilitas dan kemampuan kreatif untuk memecahkan masalah dan mendesentralisasikan pengambilan keputusan hingga kepada individu guru, orang tua dan anak. Diperlukan untuk: pengakuan atas hak anak serta kemampuan dan potensinya; Mengakui bahwa semua anak dapat belajar dan juga mengambil manfaat dari pendidikan; Kemajuan dalam pengetahuan mengenai anak, interaksi, komunikasi dan proses belajar.

Kedua, kurikulum lokal, regional atau nasional. Di banyak negara, kurikulum dipatuhi secara kaku. Penting untuk mengecek dan memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan kebijakan dan undang-undang. Untuk mengkaji kurikulum, kita

³⁰ Muhamimin A. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h.126.

harus melihat apakah kurikulum tersebut berisi: rencana yang akan meningkatkan pendidikan yang sesuai dengan kebijakan, termasuk mempersiapkan anak untuk kehidupan; Cukup ruang untuk fleksibilitas berdasarkan asesmen, evaluasi dan monitoring diri yang berkesinambungan. Pertimbangan juga harus diberikan terhadap keunikan dan gaya belajar yang berbeda dari peserta didik dan lain sebagainya.

Ketiga, perubahan pendidikan yang potensial. Dalam artian hubungan antara pendidikan Islam dan pendidikan inklusi harus didukung oleh reorientasi di lapangan, dalam bidang pendidikan guru dan dalam penelitian. Ini akan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk meneliti keragaman lokal dan mengembangkan pemahaman yang mendalam dari pendidikan yang akan dilaksanakan.

Keempat, kerjasama lintas sektoral. Kerjasama lintas sektoral pada berbagai level akan sangat penting. Bagi penyelenggara pendidikan, hal ini memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan departemen pendidikan maupun agama yang menyelenggarakan pendidikan formal. Serta hal ini memudahkan lembaga penyelenggara pendidikan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga lain khususnya lembaga yang akan memberikan bantuan bagi suksesnya penyelenggaraan pendidikan. Seperti misalnya bantuan dari departemen kesehatan dan departemen sosial dan lain sebagainya.

Walaupun inklusi memberikan pengayaan bagi semua yang terlibat, penting untuk tidak mengesampingkan tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi.

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi tantangan yang perlu diantisipasi secara bersama-sama secara teoritis adalah³¹: *pertama*, tantangan sosial emosional yakni berkaitan dengan masalah mengembangkan interaksi dan komunikasi yang bermakna yang merupakan dasar bagi semua hubungan sosial dan pembelajaran; Mengembangkan hubungan pertemanan yang tulus; Mengatasi kesepian; Mengembangkan harga diri yang baik.

Kedua, yakni tantangan yang terkait dengan pembelajaran dan perkembangan keterampilan. Dimana hal ini mencakup mengembangkan keterampilan bahasa fungsional serta memperoleh penguasaan dan kompetensi melalui hubungan pertemanan.

Terakhir, adalah tantangan yang berkaitan dengan penyiapan dan penataran para profesional yang bekerja dalam seting inklusif. Hal ini mencakup bagaimana cara memperoleh pengalaman yang cukup dalam mengajar; Memperoleh pengetahuan baru; Dapat berpartisipasi dalam memperkenalkan perubahan yang diperlukan dalam manajemen kelas dan sekolah agar proses inklusi dapat berjalan; Memobilisasi kreatifitas yang cukup sehingga dapat benar-benar memenuhi kebutuhan setiap siswa; Memastikan bahwa semua anak mengembangkan interaksi, komunikasi dan bahasa yang fungsional; Serta memperoleh dukungan profesional bila memerlukannya.

Inilah beberapa hal yang diperlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan pendidikan inklusi dalam konteks pendidikan Islam. Agar tujuan dari pendidikan

³¹ Miriam Donath Skjorten, op.cit, h.20-21.

dalam konteks IIsam terlaksana dengan baik tanpa melihat latar belakang calon peserta didik yang akan menjadi obyek pendidikan tersebut.

BAB IV

PENDIDIKAN INKLUSI PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

A. Dasar Pemikiran Penting Pendidikan Inklusi

Sebelum melakukan analisa terhadap terhadap kajian ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan dasar pemikiran mengapa pendidikan inklusi tersebut sangat penting. Dengan harapan adanya kesamaan pemahaman dalam melakukan analisa ini nantinya. Pada dasarnya pendidikan inklusi adalah sebuah proses yang memusatkan perhatian dan merespon keanekaragaman kebutuhan peserta didik. Dengan jalan terlibat secara aktif dan turut berpartisipasi dalam belajar, budaya komunitas, mengurangi eksklusi dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan inklusi mengakomodasi semua peserta didik tanpa mempertimbangkan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik mereka dan kondisi lainnya. Dalam artian mencakup anak yang cacat dan berbakat, anak jalanan dan yang bekerja, anak dari penduduk terpencil dan nomadik (berpindah-pindah), anak dari kelompok minoritas bahasa, etnis atau budaya, dan anak dari kelompok atau wilayah yang termarginalisasikan lainnya.¹

Pendidikan inklusi bertujuan memungkinkan guru dan peserta didik merasa nyaman dalam keragaman, dan memandang keragaman bukan sebagai masalah, namun sebagai tantangan dan pengayaan bagi lingkungan belajar. Sebab

¹ UNESCO (2003), *Conceptual Paper: UNESCO Inclusive Education, a Challenge and a Vision*. <http://portal.unesco.org/education/en/ev.php>. Dalam *eprints.ums.ac.id/422/1/Fattah_Santoso.doc*.

pendidikan inklusi pada dasar adalah *hak asasi manusia*, di samping merupakan *pendidikan yang baik* dan dapat *menumbuhkan rasa sosial*. Hal ini paling tidak mengacu pada beberapa alasan diantaranya adalah: *pertama*, semua anak memiliki hak untuk belajar bersama; *kedua*, anak-anak seharusnya tidak dihargai dan didiskriminasikan dengan cara dikeluarkan atau disisihkan hanya karena kesulitan belajar dan ketidakmampuan mereka; *ketiga*, orang dewasa yang cacat, yang menggambarkan diri mereka sendiri sebagai pengawas sekolah khusus, menghendaki akhir dari segregasi (pemisahan sosial) yang terjadi selama ini; *keempat* tidak ada alasan yang sah untuk memisahkan anak dari pendidikan mereka, anak-anak milik bersama dengan kelebihan dan kemanfaat untuk setiap orang, dan mereka tidak butuh dilindungi satu sama lain.²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang baik. Adapun alasan-alasan yang menurut penulis dapat memperkuat alasan mengapa pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang baik diantaranya adalah: (1) penelitian menunjukkan bahwa anak-anak akan bekerja lebih baik, baik secara akademik maupun sosial, dalam *setting* yang inklusif; (2) tidak ada pengajaran atau pengasuhan dalam sekolah yang terpisah/khusus yang tidak dapat terjadi dalam sekolah biasa; (3) dengan diberi komitmen dan dukungan, pendidikan inklusif merupakan suatu penggunaan sumber-sumber pendidikan yang lebih efektif. Dan argumen-argumen dibalik pernyataan bahwa pendidikan inklusi dapat *membangun rasa sosial*: (1) segregasi

² Ibid.

(pemisahan sosial) mendidik anak menjadi takut, bodoh, dan menumbuhkan prasangka; (2) semua anak membutuhkan suatu pendidikan yang akan membantu mereka mengembangkan relasi-relasi dan menyiapkan mereka untuk hidup dalam arus utama; dan (3) hanya inklusi yang berpotensi untuk mengurangi ketakutan dan membangun persahabatan, penghargaan dan pengertian.³

Sedangkan mengacu pada kajian teori yang digunakan, dasar dari pada pentingnya pelaksanaan pendidikan inklusi dapat dilihat dari penjelasan berikut. *Pertama*, dilihat dari definisi pendidikan Islam. menurut Abd Rahman Saleh adalah usaha yang berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai pendidikan nya dapat memahami ajaran-ajaran Agama Islam serta menjadikannya *way of lave* (jalan keluar)⁴. Hal ini juga diperkuat dengan pendapatnya Prof. Dr omar Muhammad al-Toumi al- Syaibani bahwa Pendidikan Agama Islam adalah proses pengubahan tingkah laku individu pada kehidupan pribadi masyarakat dan alam sekitarnya. Dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.⁵

Dari definisi di atas dapat kita katakan bahwa pendidikan Islam mempunyai tujuan yang mulia yakni tidak menginginkan adanya kebodohan, buta pemahaman tentang ajaran Islam. Tanpa melihat status atau latar belakang peserta didik

³ CSIE (Centre for Studies on Inclusive Education) (2005), *Ten Reasons for Inclusion*, <http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/10rsns.htm>.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Pendidikan Islam*, (Solo: Ramadhani, 1993), h. 10.

⁵ Muhamimin A. Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h.126.

tersebut. Sebagai jalan keluar bagi peserta didik untuk membentuk kepribadian yang islami untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat kelak.

Hal ini juga menjadi tujuan negara Indonesia seperti yang termuat dalam GBPP 1994 berbunyi “Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami menghayati dan mengamalkan Agama Islam melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain adalah hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.⁶

Serta disempurnakan dalam kurikulum 2004, bahwasannya Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman dibarengi tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.⁷

Artinya negara mempunyai harapan dan tujuan yang sama dengan cita-cita dari pendidikan Islam. Serta negara membuat pendidikan Islam dapat diterapkan

⁶ Depdikbud, *GBPP 1994 SMU*, (Jakarta, 1995), h. 1.

⁷ Depdikbud, *Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran PAI SMA dan MA*, (Jakarta: 2003), h. 4.

secara sistematis untuk dilaksanakan menjadi bagian dari salah satu program pendidikan yang penting dari sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia.

Kedua, dilihat dari tujuan pelaksanaan pendidikan Islam yang tertuang dalam aspek-aspek pelaksanaan pendidikan Islam. Setidaknya memuat seperti yang di utarakan oleh Bunyamin S. Bloom dalam bukunya *The Taxonomy Of Educational Objektif Cognitive deman*, menyatakan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran PAI akan di peroleh 3 aspek kemampuan yaitu aspek pengetahuan (cognitive), aspek sikap (afective), dan aspek ketrampilan (psykomotorik).⁸

Artinya Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan kegiatan mengalihkan pengalaman, pengetahuan dan kecakapannya oleh pendidik terhadap peserta didik untuk mengarahkan menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur dan berkepribadian yang utuh yang mengenal,memahami, menghayati, mengimani bertaqwa dan berakhlak mulai serta mengamalkan ajaran-ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari dan juga akan mengarahkan manusia dalam kehidupan yang lebih baik yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Ketiga, dari sisi pengertian pendidikan inklusi. Pengertian inklusi secara luas merujuk pada konsep kewarganegaraan, hak-hak sipil dan hak-hak politik serta kewajiban-kewajiban yang harus dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Bukan hanya secara formal, tetapi sebagai sebuah kenyataan hidup mereka untuk

⁸ Muhaimin dan Abdul Ghofur, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Citra Media, 1996), h. 4.

mendapatkan kesempatan dan terlibat dalam ruang publik. Guna meningkatkan harga diri, standar hidup, mendapat pekerjaan⁹ dan lain sebagainya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Secara konseptual pengertian pendidikan inklusi adalah proses pemindahan ilmu pengetahuan kepada kelompok tertentu yang membutuhkan penanganan khusus. Adapun peserta didik yang mengalami kesulitan belajar khusus dapat berupa peserta didik yang mempunyai hambatan dalam bicara dan berbahasa, terbelakang mental, gangguan emosional yang serius, hambatan pendengaran, tunaganda, penglihatan, fisik, luka otak trauma, autis maupun hambatan kesehatan lainnya.¹⁰ Adapun hal ini akan penulis jelaskan pada sub bab berikut.

Terakhir, beberapa komponen yang perlu diperhatikan agar pendidikan Inklusi dapat berjalan dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut¹¹:

lingkungan, termasuk sikap terhadap anak-anak pada umumnya dan terhadap anak tertentu karena lingkungan mempunyai dampak yang besar bagi suksesnya pendidikan inklusi. Masalah lingkungan diantaranya berkaitan dengan beberapa masalah diantaranya: lingkungan yang tidak responsif dan kurang stimulasi, pemahaman atau kesalahpahaman guru akan proses pembelajaran, pendekatan pengajaran dan materi pembelajaran yang dipergunakan atau diterapkan oleh lingkungan pendidikan, sedangkan faktor-faktor lingkungan yang terakhir

⁹ Anthony Giddens, op. cit., h. 118.

¹⁰ J David Smith, *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*, (Bandung, Nuansa, 2006), h. 50.

¹¹ Miriam Donath Skjærten, *Menuju Inklusi dan Pengayaan*, dalam Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjærten (Editor), i, (Bandung, atas kerjasama antara Departemen Pendidikan Nasional, Braillo Norway dan Universitas Pendidikan Indonesia [UPI], 2003), h. 8.

umumnya berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik di masa lalu dan sekarang.

Faktor-faktor dalam diri anak/peserta didik mencakup: keingintahuan, motivasi, inisiatif, interaksi dan komunikasi, kompetensi social, kreatifitas, temperamen, dorongan untuk belajar dan gaya belajar, kemampuan. Terakhir, hakikat dan tingkat kecacatan yang akan menjadi obyek pendidikan inklusi. Aspek kecacatan ini merupakan bagian dari gambaran tentang peserta didik. Berdasarkan dasar pemikiran di atas, adapun titik temu antara pendidikan inklusi dengan pendidikan Islam.

B. Titik Temu Pendidikan Inklusi dengan Pendidikan Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemahaman penulis ada beberapa hal yang dapat kita gunakan sebagai alat analisa untuk mencari titik temu antara pendidikan inklusi dengan pendidikan Islam. Dimana kemudian antara pendidikan inklusi dengan pendidikan Islam tidak ada pertentangan yang sangat berarti. Bahkan dapat dikatakan tujuan dari pendidikan inklusi tidak bertentangan dengan pendidikan Islam. Adapun beberapa titik temu tersebut yang dapat kita lihat diantaranya adalah. Pertama, *pendidikan sebagai kewajiban/hak*. Dalam perspektif Islam pendidikan merupakan kewajiban prasyarat, baik untuk memahami kewajiban Islam yang lain maupun untuk membangun kebudayaan/peradaban, sementara dalam perspektif inklusi pendidikan merupakan hak asasi manusia. Pernyataan pendidikan sebagai hak atau kewajiban bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan

karena perbedaan hanya terletak pada sudut pandang terhadap substansi yang sama: 'pendidikan sebagai hak' lebih antroposentris dan 'pendidikan sebagai kewajiban' lebih teosentris.

Kedua, *prinsip pendidikan untuk semua*. Titik singgung kedua ini merupakan implikasi dari titik singgung pertama. Pendidikan inklusi, seperti telah dijelaskan, merupakan implikasi dari prinsip 'pendidikan sebagai hak asasi manusia' yang penerjemahannya dalam kebijakan global 1990 menjadi 'pendidikan untuk semua', sementara pendidikan Islam secara historis di masa peradaban klasik telah memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi 'pendidikan untuk semua' melalui pembentukan tradisi melek huruf.

Ketiga, *prinsip non-segregasi*. Titik singgung ketiga ini merupakan implikasi lain dari titik singgung pertama. Dengan memandang pendidikan sebagai kewajiban/hak asasi manusia, maka setiap manusia tidak boleh termarginalisasikan dan tersisih dalam memperoleh layanan pendidikan.

Keempat, *perspektif holistik dalam memandang peserta didik*. Baik pendidikan Islam maupun pendidikan inklusi berupaya menumbuh-kembangkan kepribadian manusia dengan mengakui segenap daya dan potensi yang dimiliki peserta didik. Kelima, *cara memandang hambatan yang lebih berorientasi pada faktor eksternal*. Titik temu yang kelima ini merupakan lanjutan dari titik temu yang keempat. Sebab pada dasarnya segenap daya dan potensi peserta didik wajib/berhak ditumbuh-kembangkan, maka faktor eksternal (lingkungan sekolah) harus memainkan peran penting untuk membantu peserta didik dalam proses

belajar mengajar. Dengan kata lain, hambatan belajar peserta didik tidak lagi hanya disalahkan pada peserta didik, tapi juga dipengaruhi oleh semua sector yang terlibat dalam dunia pendidikan.¹²

C. Pandangan Pendidikan Islam Terhadap Pendidikan Inklusi

Pendidikan menurut Islam didasarkan pada asumsi bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yaitu dengan membawa "potensi bawaan" seperti potensi "keimanan", potensi untuk memikul amanah dan tanggung jawab, potensi kecerdasan, potensi fisik. Karena dengan potensi ini, manusia mampu berkembang secara aktif dan interaktif dengan lingkungannya dan dengan bantuan orang lain atau pendidik secara sengaja agar menjadi manusia muslim yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mampu menjadi khalifah dan mengabdikan kepada Allah SWT.

Dalam al-Qur'an dijumpai ayat-ayat yang menggambarkan sifat-sifat hakiki manusia yang mempunyai implikasi baik terhadap tujuan maupun cara pengarahan perkembangannya. Misal : tentang tanggung jawab, bahwa manusia diciptakan tidak sia-sia, tetapi juga potensi untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan sesuai dengan tingkat kemampuan daya pikul seseorang menurut kodrat atau fitrah-nya dalam QS. Al-Mu'minun ayat 115 yang berbunyi:

﴿ ١١٥ ﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

¹² Ibid.

Artinya:

"Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?" (QS. Al-Mu'minun:115)

Selain itu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-Baqarah:286)

Selain itu juga manusia pada hakekat dan menurut kejadiannya bersedia dan sanggup memikul amanah (QS. Al-Ahzab:72).

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya:

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. Al-Ahzab:72)

Hal yang juga penting implikasinya bagi pendidikan adalah tanggung jawab yang ada pada manusia bersifat pribadi, artinya tidaklah seseorang dapat memikul beban orang lain, beban itu dipikul sendiri tanpa melibatkan orang lain (QS. Faathir:18).

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ
شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya:

"Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-

orang yang takut kepada azab Rabb-nya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan shalat. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali(mu).” (QS. Fathir:18)

Sifat lain yang ada pada manusia adalah manusia diberi oleh Allah kemampuan *al-bayan* (fasih perkataan - kesadaran nurani) yaitu daya untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya melalui kemampuan berkomunikasi dengan bahasa yang baik (QS. Ar-Rahman: 3-4) yang berbunyi:


 خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

Artinya: “*Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara.*” (QS.Ar-Rahman:3-4)

Dari pandangan ini, dapat dikatakan bahwa tugas dan fungsi pendidikan *pertama* adalah mengarahkan dengan sengaja segala potensi yang ada pada seseorang seoptimal mungkin sehingga ia berkembang menjadi seorang muslim yang baik.

Kedua, peranan pendidikan atau pengarah perkembangan. Potensi manusia yang dibawah sejak dari lahir itu bukan hanya bisa dikembangkan dalam lingkungan tetapi juga hanya bisa berkembang secara terarah bila dengan bantuan orang lain atau pendidik. Dengan demikian, tugas pendidik mengarahkan segala potensi subyek didik seoptimal mungkin agar ia dapat memikul amanah dan

tanggung jawabnya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, sesuai dengan profil manusia Muslim yang baik.

Ketiga, profil manusia Muslim. Profil dasar seorang Muslim yang baik adalah ketaqwaan kepada Allah. Dengan demikian, perkembangan anak haruslah secara sengaja diarahkan kepada pembentukan ketaqwaan.

Keempat, metodologi pendidikan. Metodologi diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang, khususnya pada proses belajar-mengajar. Maka, pandangan bahwa seseorang dilahirkan dengan potensi bawaan tertentu dan dengan itu ia mampu berkembang secara aktif dalam lingkungannya, yang mempunyai implikasi dalam proses belajar peserta didik.¹³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Islam mengajar kepada umat manusia untuk selalu menuntut ilmu tanpa memandang mereka memiliki keterbatasan secara fisik maupun psikis. Hal ini sekali lagi dapat dikatakan sesuai dengan semangat dari pendidikan inklusi.

D. Kendala Penerapan Pendidikan Inklusi

Seperti yang diberikan oleh SKH Kompas ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan inklusi. Adapun beberapa kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan pendidikan inklusi disebabkan oleh beberapa factor yakni. *Pertama*, factor dukungan lingkungan pendidikan. Seperti

¹³ http://elhoeda.blogspot.com/2008/09/pendidikan-perspektif-islam_22.html

yang disampaikan oleh Wakil Direktur Kantor UNESCO di Jakarta Robert Lee mengingatkan, tanpa adanya dukungan dari lingkungan positif bagi pendidikan inklusi, maka akan terjadi marjinalisasi di sekolah dan anak berkebutuhan khusus akan tersingkir dari sekolah. Lebih jauh Robert Lee mengatakan "Sebaliknya, orangtua anak normal juga tidak mau anaknya satu kelas dengan anak berkebutuhan khusus karena takut proses belajar anaknya terganggu,".

Kedua, dari factor kurikulum. Dalam penjelasannya Raymond Gai Panting dari Divisi Pendidikan Khusus Departemen Pendidikan Malaysia juga mengakui minimnya pemahaman guru dan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus. Penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus bisa terbantu dengan kurikulum yang berpihak pada mereka. "Kurikulum seharusnya tidak hanya menitikberatkan hasil akademis, namun lebih mempersiapkan anak agar percaya diri,". Lebih jauh Renato Operti, Spesialis Program Biro Internasional Pendidikan di UNESCO, mengingatkan pendidikan inklusi tidak kemudian mensyaratkan kurikulum yang terpisah karena itu justru akan menciptakan segregasi. Sebab "Kurikulum pendidikan inklusi harus masuk dalam kurikulum arus utama. Untuk yang tidak kalah penting kemudian dari hasil evaluasi terhadap kurikulum ini adalah bagaimana mengubah cara berpikir para pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat,".¹⁴

¹⁴ Kompas, Rabu, 4 November 2009

E. Agenda Pengembangan Pendidikan Inklusi Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Seperti yang telah penulis paparkan di atas, pada dasarnya dalam perspektif pendidikan Islam sangat terbuka dengan pendidikan inklusi. Sebab semangat maupun tujuan dari pendidikan inklusi sejalan dengan pendidikan Islam. Hanya saja dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala yang dihadapi dalam melaksanakannya. Untuk itu menurut hemat penulis, dalam analisa ini perlu pula memasukkan agenda untuk mengembangkan pendidikan inklusi kedepan dalam perspektif pendidikan Islam.

Dimana dalam analisis agenda pengembangan ini dapat kita mulai dengan mengkaji orientasi dari pendidikan inklusi dari perspektif pendidikan Islam. Yang dimaksudkan disini adalah semua elemen pelaksana pendidikan Islam harus mulai melakukan inovasi terhadap kurikulum pendidikan yang digunakan. Kurikulum yang digunakan dalam hemat penulis adalah harus berorientasi kepada pendidikan yang ramah kepada semua anak yang memiliki kelainan. Baik kelainan secara fisik maupun fisikis. Serta baik yang sifatnya bawaan (sejak lahir) maupun cacat kecelakaan. Dimana pada dasarnya lingkungan pendidikan mampu mengembalikan kepercayaan diri para peserta didiknya. Agar ilmu yang didapatkan para peserta didik setara tanpa adanya perbedaan sebagai wujud dari prinsip non-segregasi dan perspektif holistik dalam memandang peserta didik.

Kedua, pengembangan kurikulum pendidikan Islam harus peka terhadap pendidikan inklusi. Artinya materi yang dimuat dalam kurikulum bukan hanya

merupakan gambaran dari gabungan antara pengetahuan dan nilai-nilai pembelajaran kognitif saja. Tetapi berlanjut pada dimensi pendidikan moral dan pendidikan estetik dan spiritual. Artinya penyatuan antara pengetahuan dan nilai (nalar dan iman) yang memperkuat spirit penelitian dan pengembangan yang terbuka, dan mengantarkan peserta didik menuju pengetahuan yang tinggi, kemampuan yang produktif, perilaku yang bermoral dan estetik, pilihan hidup individual yang logis dan sehat, dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

Ketiga, dalam proses rekrutmen peserta didik. Dalam proses rekrutmen ini harus mengacu pada prinsip ‘pendidikan sebagai kewajiban kemanusiaan’ atau prinsip ‘pendidikan untuk semua’. Sebab, bisa saja dalam praktik rekrutmen siswa baru, yang terjadi adalah penerimaan siswa-siswa pilihan/unggul saja—apa pun digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id kriteria yang dipakai. Kalau ini terjadi, akan ada calon-calon siswa yang termarginalisasikan dan tersisih. Kalau hal ini terjadi, maka cara ini sudah bertentangan atau berlawanan dengan prinsip ‘pendidikan sebagai kewajiban kemanusiaan’ atau prinsip ‘pendidikan untuk semua’.

Keempat, pada tahap operasionalisasi. Tantangan yang tidak kalah penting untuk diantisipasi adalah operasionalisasi pendidikan yang sifatnya hambatan dari faktor eksternal. Bila lingkungan sekolah harus memainkan peran sentral dalam transformasi hambatan-hambatan peserta didik, maka akan banyak terjadi perubahan (tidak sekedar modifikasi) dalam materi, pendekatan, struktur dan strategi. Perubahan dalam materi (bahan belajar) telah dilakukan, sementara kebijakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah untuk semua

peserta didik dapat dipandang sebagai langkah awal antisipasi yang tepat. Praktik dari kebijakan itu, seperti fleksibilitas guru dalam strategi pembelajaran dan perlakuan terhadap siswa, memerlukan ruang tidak saja diskusi tetapi juga terapannya dalam arti yang sebenarnya karena berhadapan dengan tembok-tembok budaya selama ini yang terkesan lebih menghambat potensi dan kreativitas siswa.

Terakhir, pada tataran evaluasi secara berkelanjutan. Perlu diperhatikan bahwa kurikulum sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi perlu menciptakan lingkungan yang ramah untuk semua peserta didik, sebagai salah satu dari perapan prinsip pendidikan inklusi, yaitu prinsip non-segregasi dan prinsip perspektif holistik dalam memandang peserta didik. Dengan lingkungan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id yang ramah, setiap peserta didik diakui sesuai dengan daya dan potensinya dan memperoleh layanan pendidikan tanpa perbedaan, disesuaikan dengan daya dan potensinya tersebut.

Tantangan ini perlu dijelaskan dalam hemat penulis sebab, karena ada beberapa titik singgung antara pendidikan Islam dan pendidikan inklusi, beberapa prinsip atau norma pendidikan inklusi telah dibicarakan dalam kajian di atas. Seperti operasionalisasi cara memandang hambatan yang lebih berorientasi pada faktor eksternal yang menuntut secara normatif-direksional peran sentral sekolah dalam transformasi hambatan-hambatan peserta didik, dan berimplikasi pada fleksibilitas kurikulum, termasuk strategi pembelajarannya. Pertanyaannya kemudian adalah sudah siapkah lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk

membangun lingkungan pendidikan yang seperti ini. Membangun *komunitas* pendukung yang melibatkan semua staf pendidikan, memiliki *persamaan* (hak yang sama). Serta secara bersama-sama *berpartisipasi* dalam mengembangkan pendidikan inklusi, sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya. Ini menurut hemat penulis merupakan tugas yang sangat berat sebab komunitas, persamaan, dan partisipasi merupakan norma-norma direksional menuju pendidikan inklusi yang nyata. Artinya lembaga pendidikan Islam harus siap mencakup anak yang cacat dan berbakat, anak jalanan dan yang bekerja, anak dari penduduk terpencil dan nomadik (berpindah-pindah), anak dari kelompok minoritas bahasa, etnis atau budaya, dan anak dari kelompok atau wilayah yang termarginalisasikan lainnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendidikan inklusi adalah sebuah proses yang memusatkan perhatian dan merespon keanekaragaman kebutuhan peserta didik. Keanekaragaman tersebut meliputi keanekaragaman kemampuan yang tidak sama dengan anak lainnya. Misalnya bagi anak-anak yang mengalami masalah-masalah bahasa (*language problems*), masalah-masalah perhatian dan aktivitas (*attention and activity problems*), masalah-masalah daya ingat (*memory problems*), masalah-masalah kognisi (*cognitive problems*), serta masalah-masalah social dan emosi (*social and emotional problems*). Pendidikan inklusi bertujuan agar guru dan peserta didik merasa nyaman dalam keragaman, dan memandang keragaman bukan sebagai masalah, namun sebagai tantangan dan pengayaan bagi lingkungan belajar.
2. Pendidikan Inklusi di lihat dari perspektif pendidikan Islam adalah sangat sejalan dengan pendidikan Islam itu sendiri, Bahkan dapat dikatakan tujuan

dari pendidikan inklusi tidak bertentangan dengan pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa titik temu antara pendidikan Islam dan pendidikan inklusi diantaranya adalah: *Pertama*, pendidikan sebagai kewajiban/hak. Dalam perspektif Islam pendidikan merupakan kewajiban prasyarat, baik untuk memahami kewajiban Islam yang lain maupun untuk membangun kebudayaan/peradaban, sementara dalam perspektif inklusi pendidikan merupakan hak asasi manusia. *Kedua*, prinsip pendidikan untuk semua. Pendidikan inklusi, seperti telah dijelaskan, merupakan implikasi dari prinsip ‘pendidikan sebagai hak asasi manusia’ yang penerjemahannya dalam kebijakan global 1990 menjadi ‘pendidikan untuk semua’, sementara pendidikan Islam secara historis di masa peradaban klasik telah memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi ‘pendidikan untuk semua’ melalui pembentukan tradisi melek huruf. *Ketiga*, prinsip non-segregasi. Dengan memandang pendidikan sebagai kewajiban/hak asasi manusia, maka setiap manusia tidak boleh termarginalisasikan dan tersisih dalam memperoleh layanan pendidikan. *Keempat*, perspektif holistic dalam memandang pesertadidik. Baik pendidikan Islam maupun pendidikan inklusi berupaya menumbuh-kembangkan kepribadian manusia dengan mengakui segenap daya dan potensi yang dimiliki peserta didik. *Kelima*, cara memandang hambatan yang lebih berorientasi pada faktor eksternal. Dalam artian pada dasarnya segenap daya dan potensi peserta didik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib/berhak ditumbuh-kembangkan, maka faktor eksternal (lingkungan sekolah) harus memainkan peran penting untuk membantu peserta didik dalam proses belajar mengajar.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis paparkan dari hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pendidikan inklusi, hendaknya lembaga pendidikan Islam perlu mempersiapkan semua sarana dan prasana yang dibutuhkan. Agar tujuan dari pendidikan inklusi tersebut dapat tercapai secara maksimal.
2. Bagi lingkungan masyarakat yang di lingkungannya terdapat lembaga pendidikan inklusi, hendaknya memberikan dukungan baik secara moral maupun material agar para peserta didik yang menjadi obyek dari pendidikan inklusi merasa dapat dukungan dan diperhatikan oleh lingkungannya. Sehingga membantu mereka dalam proses belajar mengajar.
3. Memperhatikan laju pertumbuhan masyarakat dan kebutuhan pendidikan, khususnya pendidikan inklusi. Hendaknya ke depan pemerintah maupun pihak swasta khususnya lembaga social kemasyarakatan harus membuka lembaga pendidikan yang bersifat inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

Abuddin Nata, 1997, *Filsafat Pendidikan Islam I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Anthony Giddens, 2002, *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

A.S. Sudirman R. Raharjo dan Amung H, 2001, *Media Pendidikan*, Jakarta: Grafindo Persada

CSIE (Centre for Studies on Inclusive Education), 2005, *Ten Reasons for Inclusion*, <http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/10rsns.htm>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Departemen Agama RI, 1989, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Mahkota.

_____, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

Depdikbud, 1995, *GBPP 1994 SMU*, Jakarta.

Depdikbud, 2003, *Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran PAI SMA dan MA*, Jakarta

Dimiyati dan Mujiono, 1999, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hasan Langgulung, 1995, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi, Filsafat dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Islam>, diakses pada 2 Februari 2010

<http://quran.kawanda.net/>, diakses pada 1 Januari 2010

http://elhoeda.blogspot.com/2008/09/pendidikan-perspektif-islam_22.html, diakses pada 2 Februari 2010

http://eprints.ums.ac.id/422/1/Fattah_Santoso.doc, diakses pada 1 Februari 2010

<http://idp-europe.org>, diakses pada 1 Januari 2010

<http://bk3sjatim.org/?p=148>, diakses pada 4 Januari 2010

Johnsen, B. H. Dan Skjorten, M. D, 2001, *Education -- Special Needs Education: An Introduction*, Oslo: Unipub forlag

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J David Smith, 2006, *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*, Bandung, Nuansa.

Kompas, Rabu 4 November 2009

M.K. Syarif Hidayatullah, 2008, *Pendidikan Inklusi Dan Efektifitasnya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Negeri Inklusi Klampis-Ngasem I Surabaya*, dalam Antologi Kajian Islam seri 13, Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press.

Miriam Donath Skjorten, 2003, *Menuju Inklusi dan Pengayaan*, dalam Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjorten (Editor), *Pendidikan-Pendidikan Kebutuhan Khusus Sebuah pengantar*, Bandung, atas kerjasama antara Departemen Pendidikan Nasional, Braillo Norway dan Universitas Pendidikan Indonesia [UPI].

Muhaimin, 2002, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Muhaimin A. Mujib, 1993, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigenda Karya.

Muhaimin dan Abdul Ghofur, 1996, *Strategi Belajar Mengajar*, Surabaya: Citra Media.

Muhibbin Syah, 2002, *Psikologi Pendidikan*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Muhammad Ali, 1996, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Muzayyin Arifin, 2003, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pius A Partanto & M Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Penerbit Arkola.

M. Ngalim Purwanto, 1999, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nana Sudjana, 1995, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Sinar Baru Algesindo.

Nur Uhbiyati, 1998, *Ilmu Pendidikan Islam 1 Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung, CV Pustaka Setia.

Stubs, S, 2002, *Inclusive Education Where There Are Few Resources*, Oslo: The Atlas Alliance.

Sudirman IN. dkk, 1991, *Ilmu Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suharsimi Arikunto, 1993, *Metodologi Pendidikan Islam*, Solo: Ramadhani.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

Sumadi Surya Brata, 1998, *Proses Belajar Mengajar di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Andi Offset.

Syaiful Bahri Djamarah, 1995, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta.

Tarsidi, D, *The implementation of Inclusive Education in Indonesia*. Makalah disajikan pada The 8th International Congress on Including Children with Disabilities in the Community. Stavanger, Norway, 15-17 Juni 2003

Tobroni, 2008, *Pendidikan Islam Paradigma Teologis Filosofis dan Spritualitas*, Malang, UMM Press.

UU RI No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat

Zakiah Daradjat, 1992, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.